

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kesehatan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2017
Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	10
II. Neraca	11
III. Laporan Operasional	13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	15
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	46
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	58
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	88
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	100
F. Pengungkapan Lainnya	106
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1	Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015	1
Tabel 3	Anggaran dan Jumlah Satker Kemenkes 2016	3
Tabel 4	Rekonsiliasi Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN	5
Tabel 5	Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1	6
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1	6
Tabel 7	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	7
Tabel 8	Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2016 Menurut Unit Eselon 1	7
Tabel 9	Laporan Operasional TA 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1	7
Tabel 10	Ringkasan LO per 31 Desember 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	8
Tabel 11	Laporan Perubahan Ekuitas TA 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1	8
Tabel 12	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	9
Tabel 13	Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019	22
Tabel 14	Rekapitulasi Satker Menurut Eselon 1	29
Tabel 15	Kualitas Penyisihan Piutang	41
Tabel 16	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	43
Tabel 17	Penggolongan Masa Manfaat ATB	44
Tabel 18	Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi	46
Tabel 19	Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi	46
Tabel 20	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	47
Tabel 21	Rincian Estimasi Pendapatan PNBP TA 2016 dan 2015	47
Tabel 22	Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015	48
Tabel 23	Rincian Realisasi PNBP TA 2016 dan 2015	48
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016	49
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2016	49
Tabel 26	Anggaran menurut Program TA 2016 dan 2015	50
Tabel 27	Realisasi Belanja menurut Program TA 2016 dan 2015	50
Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2016	51
Tabel 29	Anggaran menurut Jenis Belanja TA 2016 dan 2015	52
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Belanja (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	52
Tabel 31	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016	53
Tabel 32	Realisasi Belanja Pegawai (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	53
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Belanja Barang (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	54
Tabel 34	Realisasi Belanja Modal (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	54
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal Tanah (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	55
Tabel 36	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	55

Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	56
Tabel 38	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	56
Tabel 39	Realisasi Belanja Modal Lainnya (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	56
Tabel 40	Realisasi Belanja Modal BLU (<i>Netto</i>) TA 2016 dan 2015	57
Tabel 41	Daftar Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015	58
Tabel 42	Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon 1	59
Tabel 43	Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker	59
Tabel 44	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon 1	60
Tabel 45	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker	60
Tabel 46	Kas lainnya dan Setara Kas per Eselon 1	61
Tabel 47	Rincian Kas pada BLU TA 2016 dan 2015	61
Tabel 48	Kas pada BLU per Eselon 1	61
Tabel 49	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU TA 2016 dan 2015	62
Tabel 50	Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon 1	62
Tabel 51	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015	62
Tabel 52	Belanja Dibayar Dimuka per Eselon 1	62
Tabel 53	Rincian Uang Muka Belanja TA 2016 dan 2015	63
Tabel 54	Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon 1	63
Tabel 55	Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2016 dan TA 2015	63
Tabel 56	Piutang Bukan Pajak per Eselon 1	64
Tabel 57	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak TA 2016 dan 2015	64
Tabel 58	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per Eselon 1	64
Tabel 59	Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015	65
Tabel 60	Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1	65
Tabel 61	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015	65
Tabel 62	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1	65
Tabel 63	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU TA 2016 dan 2015	66
Tabel 64	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon 1	66
Tabel 65	Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU TA 2016 dan 2015	67
Tabel 66	Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon 1	67
Tabel 67	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016 dan 2015	67
Tabel 68	Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016 dan 2015	68
Tabel 69	Persediaan TA 2016 dan 2015	68
Tabel 70	Persediaan per Eselon 1	69
Tabel 71	Persediaan BLU per Eselon 1	69
Tabel 72	Aset Tetap (BMN) Tahun 2016 dan 2015	71
Tabel 73	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah	72
Tabel 74	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin	73
Tabel 75	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan	74
Tabel 76	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan	74
Tabel 77	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya	75

Tabel 78	Jumlah KDP per Eselon 1 Tahun 2016	76
Tabel 79	Mutasi Penambahan dan Pengurangan KDP	77
Tabel 80	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	77
Tabel 81	Daftar Piutang Jangka Panjang Tahun 2016 dan 2015	78
Tabel 82	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Tahun 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	78
Tabel 83	Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR Tahun 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	79
Tabel 84	Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>) Tahun 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	79
Tabel 85	Rincian Aset Lainnya Tahun 2016 dan 2015	80
Tabel 86	Aset Tak Berwujud TA 2016	80
Tabel 87	ATB - BLU TA 2016 dan 2015	81
Tabel 88	Rincian ATB per Eselon 1 TA 2016	81
Tabel 89	Rincian Mutasi ATB TA 2016	82
Tabel 90	Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya TA 2016 dan 2015	82
Tabel 91	Daftar Aset Lain-lain TA 2016	83
Tabel 92	Mutasi Aset Lain-Lain TA 2016	83
Tabel 93	Kewajiban Jangka Pendek TA 2016 dan 2015	84
Tabel 94	Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2016	85
Tabel 95	Utang Kepada Pihak Ketiga TA	85
Tabel 96	Rincian Hibah yang Belum Disahkan per Eselon 1 TA 2016	85
Tabel 97	Pendapatan Diterima di Muka TA 2016	86
Tabel 98	Pendapatan Diterima Di muka TA 2016 dan 2015	86
Tabel 99	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut Unit Eselon 1	87
Tabel 100	Pendapatan PNPB TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	88
Tabel 101	Beban Pegawai TA 2016 Menurut Unit Eselon 1	88
Tabel 102	Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015	89
Tabel 103	Beban Persediaan TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	89
Tabel 104	Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	90
Tabel 105	Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015	90
Tabel 106	Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1	90
Tabel 107	Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan TA 2015	91
Tabel 108	Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1	91
Tabel 109	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan TA 2015	92
Tabel 110	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1	92
Tabel 111	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	93
Tabel 112	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan TA 2015	93
Tabel 113	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	94
Tabel 114	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional TA 2016 dan 2015	94
Tabel 115	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	94
Tabel 116	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015	95
Tabel 117	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	95

Tabel 118	Beban Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1	96
Tabel 119	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015	96
Tabel 120	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	97
Tabel 121	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	97
Tabel 122	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015	98
Tabel 123	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	98
Tabel 124	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2016 dan 2015	98
Tabel 125	Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	99
Tabel 126	Surplus/Defisit TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	100
Tabel 127	Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	101
Tabel 128	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	102
Tabel 129	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	102
Tabel 130	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	103
Tabel 131	Koreksi Lain-Lain TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	103
Tabel 132	Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2016 dan 2015	104
Tabel 133	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1	104
Tabel 134	Restrukturisasi Unit Eselon 1	106
Tabel 135	Satuan Kerja yang di Likuidasi TA 2016	107
Tabel 136	Penambahan Satuan Kerja Baru TA 2016	107
Tabel 137	Perubahan Nama Satuan Kerja TA 2016	108

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016	51

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Program Indonesia Sehat	18
Gambar 2 3 Pilar Program Indonesia Sehat	18
Gambar 3 Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019	23
Gambar 4 Menkes Nila F. Moeloek pada Acara Temu Media 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi JK, di Bina Graha, Jakarta	29

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2017
Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 *Audited* diuraikan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.650.421.987.370,00 atau mencapai 103,57% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp10.283.361.858.525,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp57.011.202.253.509,00 atau mencapai 86,82% dari alokasi anggaran sebesar Rp65.662.592.997.000,00. Ringkasan realisasi anggaran TA 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2016			TA 2015
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	10.283.361.858.525,00	10.650.421.987.370,00	103,57	10.311.501.480.930,00
Belanja Negara	65.662.592.997.000,00	57.011.202.253.509,00	86,82	48.852.631.450.598,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp48.027.253.687.732,00 terdiri dari Aset Lancar (*netto*) sebesar Rp7.811.531.902.898,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp39.769.461.961.778,00; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp2.254.230.316,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp444.005.592.740,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.316.606.028.013,00 dan Rp46.710.647.659.719,00.

Tabel 2
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	7.811.531.902.898,00	5.853.058.939.701,00	1.958.472.963.197,00	33,46
Aset Tetap	39.769.461.961.778,00	38.772.063.438.275,00	997.398.523.503,00	2,57
Piutang Jangka Panjang	2.254.230.316,00	2.708.447.093,00	(454.216.777,00)	(16,77)
Aset Lainnya	444.005.592.740,00	593.951.544.184,00	(149.945.951.444,00)	(25,25)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	(Rp)	%
Jumlah Aset	48.027.253.687.732,00	45.221.782.369.253,00	2.805.471.318.479,00	6,20
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.316.606.028.013,00	1.060.072.481.404,00	256.533.546.609,00	24,20
Ekuitas				
Ekuitas	46.710.647.659.719,00	44.161.709.887.849,00	2.548.937.771.870,00	5,77
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	48.027.253.687.732,00	45.221.782.369.253,00	2.805.471.318.479,00	6,20

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.330.339.747.254,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp56.277.972.457.580,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp44.947.632.710.326,00. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp49.396.157.600,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp44.997.028.867.926,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp44.161.709.887.849,00, ditambah kenaikan Ekuitas selama tahun 2016 sebesar Rp2.548.937.771.870,00, sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp46.710.647.659.719,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

5.1. Informasi Penting Pelaksanaan Anggaran

- a. Jumlah Satker Kemenkes TA 2016 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 418 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp65.662.592.997.000,00, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2016.

Jumlah DIPA sebanyak 418 Satker, dengan rincian sesuai Jenis Kewenangan dan hubungan kerja dengan KPPN, yaitu Kantor Pusat (KP) sebanyak 48 Satker, Kantor Daerah (KD) sebanyak 166 Satker, Dekonsentrasi (DK) sebanyak 204 Satker, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran dan Jumlah Satker Kemenkes 2016
(dalam rupiah)

No	Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Anggaran
1	Kantor Pusat (KP)	48	40.795.676.107.000,00
2	Kantor Daerah (KD)	166	22.753.857.833.000,00
3	Dekonsentrasi (DK)	204	2.113.059.057.000,00
Total		418	65.662.592.997.000,00

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memiliki Satker yang sudah tidak aktif yaitu Satker Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.065 dan 4 satker KP. Sehingga jumlah keseluruhan Satker Kementerian Kesehatan baik aktif maupun in-aktif berdasarkan e-Rekon adalah sebanyak 1.487 satker.

- b. Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

5.2. Informasi Penting Terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA 2016

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
 - Kantor Daerah
 - Satker Kantor Daerah → Wilayah → Eselon 1 → Kementerian Kesehatan
 - Kantor Pusat
 - Satker Kantor Pusat → Eselon 1 → Kementerian Kesehatan
 - Dekonsentrasi
 - Satker Dekonsentrasi → Eselon 1 → Kementerian Kesehatan
- b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/78/2016 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Vertikal Kemenkes;
- c. Unit Akuntansi tingkat Eselon 1, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon 1 terkait untuk setiap tahun anggaran menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon 1 (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- d. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan tahun 2016 telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan;
- e. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara dan (KPPN), Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Perbendaharaan melalui aplikasi e-Rekon-LK;

- f. Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan barang milik negara di tingkat satker, telah dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) dengan KPKNL dengan tata cara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5.3. Beberapa Peraturan yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2016

- a. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- d. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- e. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- f. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-504/KN/2017 tentang Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Barang Pengguna (LBP) Tahun 2016 (*Audited*);
- h. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5445/PB/2016 tentang Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah disahkan ke Kas Negara;
- i. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1847/PB/2017 tentang Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL;
- j. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5660/PB.6/2016 tentang Kebijakan Akuntansi dalam rangka Penyusunan LKKL;
- k. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2866/PB/2017 tentang Lanjut Perbedaan Data SAI dan SiAP atas Setoran Pendapatan kepada Satker Tidak Aktif Tahun 2016;
- l. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3123/PB/2017 tentang Surat Koreksi Dokumen Sumber dan Surat Pernyataan Tindak Lanjut Perbedaan Data SiAP dan SAI atas Setoran Pendapatan/Pengembalian Belanja kepada Satker Tidak Aktif TA 2016.

5.4. Kemenkes telah Menerbitkan Peraturan dan Kebijakan untuk Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2016

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Kesehatan selaku pengguna barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/345/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Likuidasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/2037/2016 Tanggal 13 September 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No.HK.03.03/III/2235/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5.5. Rekonsiliasi Internal

Telah dilakukan Rekonsiliasi Internal UAPB dengan UAPA Kementerian Kesehatan dengan cara membandingkan data Unit Akuntansi Barang dengan data yang disusun oleh Unit Akuntansi Keuangan untuk periode 31 Desember 2016, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Rekonsiliasi Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selisih
117	Persediaan	2.893.566.102.603,00	3.077.583.352.383,00	(184.017.249.780,00)
131	Tanah	15.669.304.013.950,00	15.669.304.013.950,00	0,00
132	Peralatan Dan Mesin	29.185.836.978.437,00	29.185.833.044.437,00	3.934.000,00
133	Gedung Dan Bangunan	13.055.538.687.281,00	13.055.538.687.281,00	0,00
134	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	615.604.276.627,00	615.604.276.627,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	245.301.966.779,00	245.301.966.779,00	0,00
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.487.998.621.611,00	3.487.998.621.611,00	0,00
162	Aset Tidak Berwujud	213.943.801.209,00	213.943.801.209,00	0,00
166	Aset Lain-Lain	1.716.758.600.562,00	11.242.713.880.784,00	(9.525.955.280.222,00)
Total Selisih SAIBA-SIMAK BMN		67.083.853.049.059,00	76.793.821.645.061,00	(9.709.968.596.002,00)

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat perbedaan total aset sebelum penyusutan yaitu SAIBA lebih rendah dari SIMAK-BMN sebesar Rp9.709.968.596.002,00.

5.6. Koreksi dan Tindak lanjut Laporan Keuangan Kemenkes TA 2016

Terdapat beberapa perubahan/koreksi, baik internal maupun audit Tim BPK yang berdampak pada adanya penambahan dan pengurangan pada LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK Kemenkes per 31 Desember 2016.

- a. Langkah-langkah koreksi:
Koreksi atas Laporan Keuangan dilakukan setelah penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada satker terkait dan sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat satker serta disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan.
- b. Beberapa koreksi/penyesuaian yang dilakukan antara lain:
 - 1) Realisasi PNPB mengalami koreksi penambahan pada Unit Eselon 1 Ditjen Kesmas. Ditjen Yankes, dan Ditjen P2P. Seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
Sekjen	21.070.425.000,00	32.821.394.234,00	0,00	0,00	21.070.425.000,00	32.821.394.234,00
Itjen	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Ditjen Kesmas	675.548.000,00	3.819.426.042,00	0,00	1.219.648.985,00	675.548.000,00	5.039.075.027,00
Ditjen Yankes	9.504.166.454.458,00	9.501.494.290.519,00	0,00	108.560.499,00	9.504.166.454.458,00	9.501.602.851.018,00
Ditjen P2P	161.014.087.588,00	344.963.758.310,00	0,00	135.305.743,00	161.014.087.588,00	345.099.064.053,00
Ditjen Farmalkes	26.094.000.179,00	81.641.261.633,00	0,00	0,00	26.094.000.179,00	81.641.261.633,00
Badan Litbang Kes	2.919.590.000,00	5.759.757.869,00	0,00	0,00	2.919.590.000,00	5.759.757.869,00
Badan PPSDM Kes	567.421.753.300,00	678.436.083.536,00	0,00	0,00	567.421.753.300,00	678.436.083.536,00
Jumlah	10.283.361.858.525,00	10.648.958.472.143,00	0,00	1.463.515.227,00	10.283.361.858.525,00	10.650.421.987.370,00

Alokasi/anggaran Belanja mengalami koreksi penambahan pada Unit Eselon 1 Ditjen Kesmas. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Sekjen	29.614.669.816.000,00	28.477.468.532.772,00	0,00	0,00	29.614.669.816.000,00	28.477.468.532.772,00
Itjen	105.000.000.000,00	95.147.660.137,00	0,00	0,00	105.000.000.000,00	95.147.660.137,00
Ditjen Kesmas	2.638.851.121.000,00	1.644.560.585.637,00	1.000,00	0,00	2.638.851.122.000,00	1.644.560.585.637,00
Ditjen Yankes	18.511.935.411.000,00	15.819.776.577.212,00	0,00	0,00	18.511.935.411.000,00	15.819.776.577.212,00
Ditjen P2P	4.580.562.750.000,00	3.476.545.322.041,00	0,00	0,00	4.580.562.750.000,00	3.476.545.322.041,00
Ditjen Farmalkes	3.251.823.220.000,00	2.723.129.974.694,00	0,00	0,00	3.251.823.220.000,00	2.723.129.974.694,00
Badan Litbang Kes	1.048.691.657.000,00	733.493.190.525,00	0,00	0,00	1.048.691.657.000,00	733.493.190.525,00
Badan PPSDM Kes	5.911.059.021.000,00	4.041.080.410.491,00	0,00	0,00	5.911.059.021.000,00	4.041.080.410.491,00
Jumlah	65.662.592.996.000,00	57.011.202.253.509,00	1.000,00	0,00	65.662.592.997.000,00	57.011.202.253.509,00

- 2) Neraca, mengalami koreksi antara lain: Aset Lancar bertambah, Aset Tetap berkurang, Piutang Jangka Panjang berkurang, Aset Lainnya berkurang, Kewajiban Jangka Pendek bertambah dan Ekuitas bertambah. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2016		
	Unaudited	Koreksi	Audited
Aset			
Aset Lancar	7.249.582.399.572,00	561.949.503.326,00	7.811.531.902.898,00
Aset Tetap	39.771.001.054.172,00	(1.539.092.394,00)	39.769.461.961.778,00
Piutang Jangka Panjang	2.267.166.746,00	(12.936.430,00)	2.254.230.316,00
Aset Lainnya	445.291.657.747,00	(1.286.065.007,00)	444.005.592.740,00
Jumlah Aset	47.468.142.278.237,00	559.111.409.495,00	48.027.253.687.732,00
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	1.292.069.577.574,00	24.536.450.439,00	1.316.606.028.013,00
Ekuitas	46.176.072.700.663,00	534.574.959.056,00	46.710.647.659.719,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	47.468.142.278.237,00	559.111.409.495,00	48.027.253.687.732,00

Hasil koreksi Neraca per 31 Desember 2016 menurut Eselon 1, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2016 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Sekretariat Jenderal	2.279.664.122.627,00	31.355.836.899,00	500.649.441,00	2.310.519.310.085,00
Inspektorat Jenderal	7.680.450.691,00	0,00	0,00	7.680.450.691,00
Ditjen Kesehatan Masyarakat	350.603.722.368,00	1.984.686.591,00	5.334.893.018,00	347.253.515.941,00
Ditjen Pelayanan Kesehatan	31.313.923.352.303,00	757.545.718.398,00	209.802.949.594,00	31.861.666.121.107,00
Ditjen Pemberantasan Penyakit	4.439.498.943.716,00	4.440.265.205,00	13.805.860.452,00	4.430.133.348.469,00
Ditjen Farmalkes	211.756.677.023,00	1.055.384.510,00	961.787.510,00	211.850.274.023,00
Badan Litbang Kesehatan	776.217.235.648,00	2.065.915.077,00	2.139.231.416,00	776.143.919.309,00
Badan PPSDM Kesehatan	8.088.797.773.861,00	4.558.616.309,00	11.349.642.063,00	8.082.006.748.107,00
Jumlah	47.468.142.278.237,00	803.006.422.989,00	243.895.013.494,00	48.027.253.687.732,00

- 3) LO mengalami koreksi/penyesuaian hasil audit berupa penambahan dan pengurangan terjadi pada semua Eselon 1 kecuali pada Inspektorat Jenderal. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Laporan Operasional TA 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Sekretariat Jenderal	28.561.129.625.410,00	590.987.661,00	60.955.558.298,00	28.500.765.054.773,00
Inspektorat Jenderal	95.476.481.374,00	0,00	0,00	95.476.481.374,00
Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.729.949.884.444,00	13.717.499.303,00	2.697.698.990,00	1.740.969.684.757,00
Ditjen Pelayanan Kesehatan	7.796.520.525.776,00	118.864.852.530,00	1.358.294.668.238,00	6.557.090.710.068,00
Ditjen Pemberantasan Penyakit	3.080.028.384.595,00	11.992.307.757,00	2.633.507.588,00	3.089.387.184.764,00

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Ditjen Farmalkes	1.588.101.946.926,00	99.680.660,00	140.169.500,00	1.588.061.458.086,00
Badan Litbang Kesehatan	736.001.400.733,00	126.192.000,00	130.805.278,00	735.996.787.455,00
Badan PPSDM Kesehatan	2.679.290.034.723,00	11.856.397.101,00	1.864.925.175,00	2.689.281.506.649,00
Jumlah	46.266.498.283.981,00	157.247.917.012,00	1.426.717.333.067,00	44.997.028.867.926,00

Ringkasan LO Kemenkes per 31 Desember 2016 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 10
Ringkasan LO per 31 Desember 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

URAIAN	2016 (Unaudited)	KOREKSI		2016 (Audited)
		D	K	
KEGIATAN OPERASIONAL				
Jumlah Pendapatan Operasional	10.754.084.748.725,00	28.638.572.051,00	604.893.570.580,00	11.330.339.747.254,00
Jumlah Beban Operasional	56.228.930.604.444,00	123.966.117.011,00	74.924.263.875,00	56.277.972.457.580,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(45.474.845.855.719,00)	152.604.689.062,00	679.817.834.455,00	(44.947.632.710.326,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(254.464.081.279,00)	2.897.998.836,00	1.268.228.236,00	(256.093.851.879,00)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(537.188.346.983,00)	1.745.229.114,00	745.631.270.376,00	206.697.694.279,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(791.652.428.262,00)	4.643.227.950,00	746.899.498.612,00	(49.396.157.600,00)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(46.266.498.283.981,00)	157.247.917.012,00	1.426.717.333.067,00	(44.997.028.867.926,00)

Hasil koreksi LPE per 31 Desember 2016 menurut Unit Eselon 1, seperti pada tabel berikut:

Tabel 11
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Sekretariat Jenderal	2.275.183.925.482,00	60.510.085.939,00	90.777.474.397,00	2.305.451.313.940,00
Inspektorat Jenderal	7.680.450.691,00	0,00	0,00	7.680.450.691,00
Ditjen Kesehatan Masyarakat	350.055.457.669,00	16.752.378.014,00	13.402.171.587,00	346.705.251.242,00
Ditjen Pelayanan Kesehatan	30.151.188.824.194,00	863.000.841.127,00	1.386.057.787.370,00	30.674.245.770.437,00
Ditjen Pemberantasan Penyakit	4.420.872.433.363,00	13.032.564.949,00	3.619.724.149,00	4.411.459.592.563,00
Ditjen Farmalkes	201.741.775.501,00	99.680.660,00	1.101.957.010,00	202.744.051.851,00
Badan Litbang Kesehatan	775.328.052.862,00	1.138.924.009,00	950.227.028,00	775.139.355.881,00
Badan PPSDM Kesehatan	7.994.021.780.901,00	12.280.383.698,00	5.480.475.911,00	7.987.221.873.114,00
Jumlah	46.176.072.700.663,00	966.814.858.396,00	1.501.389.817.452,00	46.710.647.659.719,00

Ringkasan LPE per 31 Desember 2016 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 12
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

URAIAN	2016 (<i>Unaudited</i>)	KOREKSI		2016 (<i>Audited</i>)
		D	K	
EKUITAS AWAL (A)	44.161.709.887.849,00			44.161.709.887.849,00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (B)	(46.266.498.283.981,00)	157.247.917.012,00	1.426.717.333.067,00	(44.997.028.867.926,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (C)	1.570.470.467.145,00	807.189.022.306,00	33.416.689.687,00	796.698.134.526,00
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	932.359.253.238,00	743.297.110.032,00	3.908.270.765,00	192.970.413.971,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	588.643.559.999,00	0,00	0,00	588.643.559.999,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(127.798.584.977,00)	2.357.870.582,00	27.858.681.772,00	(102.297.773.787,00)
Lain – lain	177.266.238.885,00	61.534.041.692,00	1.649.737.150,00	117.381.934.343,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (D)	46.710.390.629.650,00	2.377.919.078,00	41.255.794.698,00	46.749.268.505.270,00
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (E = B + C + D)	2.014.362.812.814,00	966.814.858.396,00	1.501.389.817.452,00	2.548.937.771.870,00
EKUITAS AKHIR (F = A + E)	46.176.072.700.663,00			46.710.647.659.719,00

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	TA 2016		%	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	B.1.1	10.283.361.858.525,00	10.650.421.987.370,00	103,57	10.311.501.480.930,00
PNBP Lainnya	B.1.1.1	519.429.223.580,00	887.498.790.803,00	170,86	681.762.139.445,00
Pendapatan BLU	B.1.1.2	9.763.932.634.945,00	9.762.923.196.567,00	99,99	9.629.739.341.485,00
JUMLAH PENDAPATAN		10.283.361.858.525,00	10.650.421.987.370,00	103,57	10.311.501.480.930,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	7.237.181.088.000,00	6.632.108.148.885,00	91,64	5.743.406.994.244,00
Belanja Barang	B.2.2	26.701.830.766.000,00	20.795.758.286.293,00	77,88	18.030.159.357.767,00
Belanja Modal	B.2.3	6.221.181.143.000,00	4.768.351.966.206,00	76,65	5.194.700.813.387,00
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	25.502.400.000.000,00	24.814.983.852.125,00	97,30	19.884.364.285.200,00
JUMLAH BELANJA		65.662.592.997.000,00	57.011.202.253.509,00	86,82	48.852.631.450.598,00

II. NERACA

KEMENTERIAN KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.399.069.596,00	1.827.265.090,00	(23,43)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	616.914.118,00	679.520.034,00	(9,21)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	484.358.461.194,00	509.571.905.312,00	(4,95)
Kas pada BLU	C.4	2.350.139.199.167,00	2.469.954.947.858,00	(4,85)
Investasi Jangka Pendek- BLU	C.5	283.078.842.932,00	232.605.000.000,00	21,70
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.6	114.879.203.713,00	21.766.791.441,00	427,77
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	C.7	949.749.028,00	-	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	1.723.122.231,00	6.770.401.520,00	(74,55)
Piutang Bukan Pajak	C.9	28.597.016.130,00	54.076.509.981,00	(47,12)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(1.712.825.512,00)	(3.801.981.284,00)	(54,95)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		26.884.190.618,00	50.274.528.697,00	(46,53)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.11	629.935.089,00	168.686.744,00	273,43
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.12	(50.412.175,00)	(2.294.433,00)	2.097,15
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rugi (Netto)		579.522.914,00	166.392.311,00	248,29
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	2.009.415.810.944,00	1.119.369.981.747,00	79,51
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	(359.456.896.438,00)	(292.387.905.301,00)	22,94
Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)		1.649.958.914.506,00	826.982.076.446,00	99,52
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	4.092.738.621,00	2.622.480.125,00	56,06
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	(694.128.343,00)	(435.177.182,00)	59,50
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		3.398.610.278,00	2.187.302.943,00	55,38
Persediaan	C.17	2.081.621.562.988,00	944.864.695.500,00	120,31
Persediaan BLU	C.18	811.944.539.615,00	785.408.112.549,00	3,38
JUMLAH ASET LANCAR		7.811.531.902.898,00	5.853.058.939.701,00	33,46
ASET TETAP				
Tanah	C.19	3.815.223.275.869,00	3.086.412.519.684,00	23,61
Tanah BLU	C.20	11.854.080.738.081,00	11.806.158.640.149,00	0,41
Peralatan dan Mesin	C.21	17.307.412.435.510,00	16.990.046.508.419,00	1,87
Peralatan dan Mesin BLU	C.22	11.878.424.542.927,00	9.767.986.555.928,00	21,61
Gedung dan Bangunan	C.23	5.253.077.149.711,00	4.920.668.720.474,00	6,76
Gedung dan Bangunan BLU	C.24	7.802.461.537.570,00	6.834.920.640.500,00	14,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	177.359.729.434,00	164.428.425.942,00	7,86
Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	C.26	438.244.547.193,00	412.440.889.251,00	6,26
Aset Tetap Lainnya	C.27	164.392.448.316,00	160.444.894.114,00	2,46
Aset Tetap Lainnya BLU	C.28	80.909.518.463,00	79.103.782.981,00	2,28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.29	1.802.252.509.888,00	1.740.740.054.866,00	3,53
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	C.30	1.685.746.111.723,00	1.394.472.052.722,00	20,89
Akumulasi <i>Penyusutan</i>	C.31	(22.490.122.582.907,00)	(18.585.760.246.755,00)	21,01
JUMLAH ASET TETAP		39.769.461.961.778,00	38.772.063.438.275,00	2,57
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.32	1.813.179.303,00	2.579.144.138,00	(29,70)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.33	(62.008.956,00)	(92.840.247,00)	(33,21)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
Piutang Tagihan TP/TGr (Netto)		1.751.170.347,00	2.486.303.891,00	(29,57)
Piutang Tagihan TP/TGR BLU	C.34	248.013.500,00	223.259.500,00	11,09
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU	C.35	(5.206.698,00)	(1.116.298,00)	366,43
Piutang Tagihan TP/TGRi BLU (Netto)		242.806.802,00	222.143.202,00	(9,30)
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.36	261.560.972,00	0,00	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang lainnya	C.37	(1.307.805,00)	0,00	
Piutang Jangka Panjang lainnya (Netto)		260.253.167,00	0,00	
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		2.254.230.316,00	2.708.447.093,00	(16,77)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	C.38	133.553.232.107,00	116.462.625.878,00	14,67
Aset Tak Berwujud-BLU	C.39	79.614.025.902,00	60.701.691.760,00	31,16
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	C.40	776.543.200,00	30.890.200,00	2.413,88
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.41	7.878.117.509,00	12.195.484.432,00	(35,40)
Aset Lain-lain	C.42	1.482.723.182.783,00	1.481.166.810.771,00	0,11
Aset Lain-lain-BLU	C.43	234.035.417.779,00	152.039.814.951,00	53,93
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(1.494.574.926.540,00)	(1.228.645.773.808,00)	21,64
JUMLAH ASET LAINNYA		444.005.592.740,00	593.951.544.184,00	(25,25)
JUMLAH ASET		48.027.253.687.732,00	45.221.782.369.253,00	6,20
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	1.189.124.596.465,00	951.355.609.080,00	24,99
Hibah Yang Belum Disahkan	C.46	18.094.784.043,00	19.481.326.714,00	(7,12)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.47	107.974.260.223,00	86.302.384.439,00	25,11
Uang Muka dari KPPN	C.48	1.399.069.596,00	1.827.265.090,00	(23,43)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.49	13.317.686,00	1.105.896.081,00	(98,80)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.316.606.028.013,00	1.060.072.481.404,00	24,20
JUMLAH KEWAJIBAN		1.316.606.028.013,00	1.060.072.481.404,00	24,20
EKUITAS				
EKUITAS	C.50	46.710.647.659.719,00	44.161.709.887.849,00	5,77
JUMLAH EKUITAS		46.710.647.659.719,00	44.161.709.887.849,00	5,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		48.027.253.687.732,00	45.221.782.369.253,00	6,20

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	D.1			
Pendapatan PNBP Lainnya		11.330.339.747.254,00	9.825.703.886.896,00	15,31
JUMLAH PENDAPATAN		11.330.339.747.254,00	9.825.703.886.896,00	15,31
BEBAN	D.2			
Beban Pegawai	D.2.1	10.356.791.122.766,00	8.856.615.537.140,00	16,94
Beban Persediaan	D.2.2	4.265.156.978.310,00	4.043.127.098.410,00	5,49
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	5.649.890.539.577,00	6.431.868.267.143,00	(12,16)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.036.014.871.240,00	896.221.217.913,00	15,60
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.839.797.760.514,00	1.681.137.032.462,00	68,92
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	2.964.106.922.061,00	2.206.623.078.833,00	34,33
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	24.814.347.603.125,00	19.884.364.285.200,00	24,79
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	4.275.703.136.645,00	4.207.841.607.113,00	1,61
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	76.163.523.342,00	26.615.498.749,00	186,16
JUMLAH BEBAN		56.277.972.457.580,00	48.234.413.622.963,00	16,68
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(44.947.632.710.326,00)	(38.408.709.736.067,00)	17,02
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	(256.093.851.879,00)	(52.951.893.099,00)	383,63
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.1	4.075.760.361,00	3.304.485.770,00	23,34
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.2	260.169.612.240,00	56.256.378.869,00	362,47
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	206.697.694.279,00	168.563.575.850,00	22,62
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	534.722.242.871,00	190.147.787.448,00	181,21
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	328.024.548.592,00	21.584.211.598,00	1.419,74
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	(49.396.157.600,00)	115.611.682.751,00	(142,73)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(44.997.028.867.926,00)	(38.293.098.053.316,00)	17,51
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.7	(44.997.028.867.926,00)	(38.293.098.053.316,00)	17,51

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

PERKIRAAN	Ref.	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	%
EKUITAS AWAL	E.1	44.161.709.887.849,00	42.295.954.922.184,00	4,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(44.997.028.867.926,00)	(38.293.098.053.316,00)	17,51
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		0,00	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	796.698.134.526,00	1.117.563.694.210,00	(28,71)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0,00	71.436.664.304,00	(100,00)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	192.970.413.971,00	31.214.401.398,00	518,21
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	588.643.559.999,00	389.343.679,00	151.088,68
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	(102.297.773.787,00)	622.002.473.137,00	(116,45)
Lain-lain	E.3.5	117.381.934.343,00	392.520.811.692,00	(70,10)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	46.749.268.505.270,00	39.041.289.324.771,00	19,74
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.548.937.771.870,00	1.865.754.965.665,00	36,62
EKUITAS AKHIR	E.5	46.710.647.659.719,00	44.161.709.887.849,00	5,77

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM***Dasar Hukum***A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. PMK Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
8. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. PMK Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Standar;
10. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
11. PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah pusat;
12. PMK Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
13. PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan.
15. PMK Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. PMK Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
17. PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar

- Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
18. PMK Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
 19. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 21. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-615/PB/2016 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 23. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-369/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Aset Tak Berwujud, Penyajian Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, Persediaan dan Normalisasi Data BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2016.

Rencana Strategis

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Kesehatan

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan menetapkan Rencana Strategis yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 didasarkan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

VISI MISI

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pembangunan nasional 2015-2019, pemerintah akan mewujudkan TRISAKTI yang ditetapkan dalam 9 agenda prioritas (NAWACITA). Kementerian Kesehatan juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas kabinet kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada agenda ke-5 NAWACITA akan dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja serta Program Indonesia Sejahtera.

Gambar 1
Program Indonesia Sehat



Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Program Indonesia Sehat terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu:

1. Paradigma Sehat;
2. Penguatan Yankes melalui Peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat dan Penguatan Sistem Rujukan; dan
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Gambar 2
3 Pilar Program Indonesia Sehat



Pilar 1. Paradigma Sehat

Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir *stakeholder* dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan gerakan masyarakat hidup sehat.

Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
2. Penerapan pendekatan *continuum of care*;
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*).

Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional

Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan *benefit package*, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan 2015-2019, secara keseluruhan maka diperlukan integrasi program dan kegiatan, dimana program prioritas difokuskan kepada 4 (empat) program, yakni:

1. Penurunan AKI dan AKB (Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Imunisasi);
2. Perbaikan Gizi khususnya *stunting*;
3. Pengendalian Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis dan Malaria);
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas dan Kanker).

Adapun program lainnya:

1. Prioritas kegiatan diutamakan ke promotif & preventif, termasuk kegiatan pro-aktif menjangkau sasaran ke luar gedung Puskesmas;
2. Fokus utama pada pelayanan kesehatan dasar (*Primary Care*);
3. Menjangkau sasaran utamanya dengan pendekatan keluarga.

Ketiga program ini akan berintegrasi dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.

TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

TUJUAN

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012);
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%;
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah:

- a. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan daerah;
- c. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
- d. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. Penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 13
Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019

No.	Indikator	Status Awal	Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
a	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP2010)	306
b	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
c	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
d	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
a	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
b	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,50
c	Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
d	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
e	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
f	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
a	Jumlah kecamatan Yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
b	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
c	Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan			
a	Persentase kepesertaan SJSN Kes (%) ((persenn	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
b	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
c	Persentase RSUD kabupaten/ kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
d	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90
e	Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

- a. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
- b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
- c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. Meningkatkan akses yankes dasar yang berkualitas;
- e. Meningkatkan akses yankes rujukan yang berkualitas;
- f. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
- g. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan;

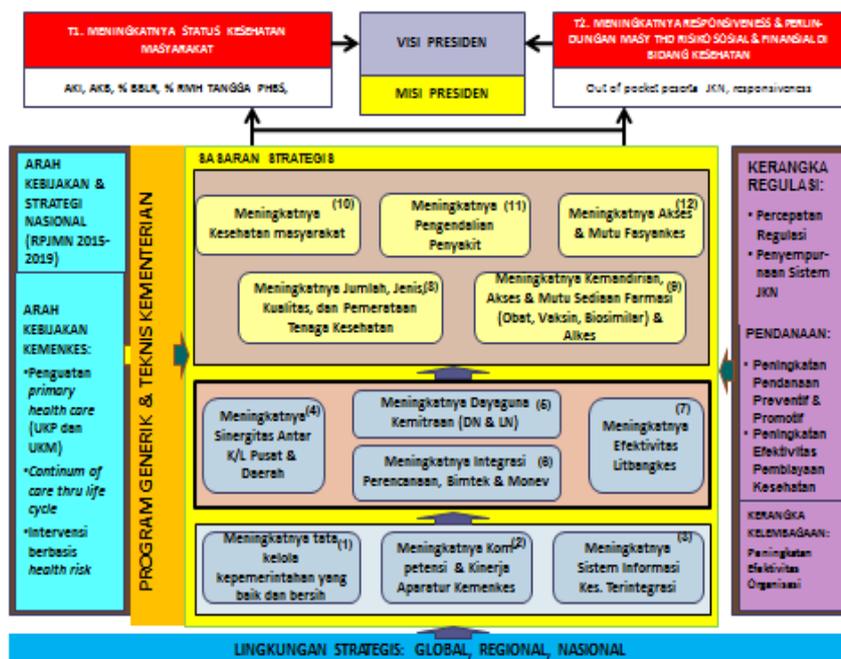
- h. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- i. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Menguatkan manajemen, litbang dan sistem informasi;
- k. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan;
- l. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
- m. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Kesehatan maka ditetapkan strategi Kementerian Kesehatan yang disusun seperti pada Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Gambar 3
Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019



Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat;
- b. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
- c. Melaksanakan paya kesehatan perorangan;
- d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu:

- a. Peningkatan SDM;
- b. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
- c. Peningkatan pembiayaan;
- d. Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan
- e. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Peningkatan sumber daya manusia di puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan metode *team-based*.

Kemampuan manajemen puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.

Pengembangan sistem informasi kesehatan di puskesmas diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan akreditasi puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan.

Dalam penguatan puskesmas, yang dimaksud dengan penguatan puskesmas adalah penyiapan tenaga kesehatan dan sistem kesehatan untuk memastikan *health service readiness*.

2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Strategi Kemenkes disusun sebagai jalinan strategi dan tahapan-tahapan pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan baik yang tertuang dalam tujuan 1 (T1) maupun tujuan 2 (T2). **Tujuan Kementerian Kesehatan diarahkan dalam rangka pencapaian visi misi Presiden.** Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut Kementerian Kesehatan perlu memastikan bahwa terdapat dua belas sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai arah dan prioritas strategis dalam lima tahun mendatang. Ke dua belas sasaran strategis tersebut membentuk suatu hipotesis jalinan sebab-akibat untuk mewujudkan tercapainya T1 dan T2.

3. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk:

- a. Penyediaan regulasi dari turunan undang-undang yang terkait dengan kesehatan;
- b. Meningkatkan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- e. Penguatan kemandirian obat dan alkes;
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang lebih bermutu;
- g. Penguatan peran pemerintah di era desentralisasi; dan
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan

(*governance issues*), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien). Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat.

Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra 2015-2019.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015-2019. Program Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis.

Program generik meliputi:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. Program penguatan pelaksanaan JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- c. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan; dan
- d. Program penelitian dan pengembangan kesehatan.

Program teknis meliputi:

- a. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. Program pengendalian penyakit dan penyehatan dan lingkungan;
- c. Program pembinaan upaya kesehatan;
- d. Program kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran program dukungan manajemen dan program teknis lainnya adalah dukungan dan program teknis kementerian kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebanyak 92.

2. Program Penguatan Pelaksanaan JKN

Sasaran Program adalah menguatnya pelaksanaan JKN/KIS.

Indikator tercapainya sasaran adalah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 99,6 juta jiwa.

Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah pengembangan pembiayaan kesehatan JKN/KIS.

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi. Indikator tercapainya sasaran adalah persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 91%.

4. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Sasaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa.

6. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan mutu dan alat kesehatan.

7. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan adalah kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

8. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sasaran program penelitian dan pengembangan kesehatan adalah meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan.

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka

perlu mengefektifkan peran dan kewenangan pusat-daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan pusat-daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

Capaian Dua Tahun Kerja Nyata untuk Mewujudkan Indonesia Sehat

Pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, dengan mengacu pada visi misi Presiden. Visi Presiden adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 misi pembangunan, dimana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Dalam pembangunan nasional 2015-2019 juga dibangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti. Untuk mewujudkannya, ditetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita), dimana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Sejahtera.

Program Indonesia sehat memiliki 3 komponen yaitu:

- a. Revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat;
- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia antara lain:
 - 1) Paradigma sehat meliputi:
 - 2) pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,
 - 3) promotif - preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan
 - 4) pemberdayaan masyarakat
 - 5) Penguatan Pelayanan Kesehatan
 - 6) Peningkatan Akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - 7) Optimalisasi Sistem Rujukan
 - 8) Peningkatan Mutu
 - 9) JKN
 - 10) Benefit
 - 11) Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong
 - 12) Kendali Mutu & Kendali Biaya
 - 13) Sasaran: PBI & Non PBI

Semangat membangun dari pinggiran tercermin dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), Kemenkes memiliki terobosan untuk menempatkan tenaga kesehatan secara tim yang kita namakan program Nusantara Sehat (NS). Sedangkan penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pendekatan keluarga juga terus diupayakan, ini yang disebut dengan Program Keluarga Sehat.

Gambar 4
Menkes Nila F. Moeloek pada Acara Temu Media 2 Tahun Kerja Nyata
Jokowi JK, di Bina Graha, Jakarta



*Pendekatan
 Penyusunan
 Laporan
 Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan. Berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2016, satker Tugas Pembantuan (TP), secara penganggaran dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2016 *Audited* tidak lagi menyajikan anggaran yang berasal dari satker TP.

Kementerian Kesehatan tahun 2016 memperoleh APBN sebesar Rp65.662.592.997.000,00 didistribusikan kepada 418 Satker meliputi:

- Kantor Pusat (KP) 48 Satker: Rp40.795.676.107.000,00
- Kantor Daerah (KD) 166 Satker: Rp22.753.857.833.000,00
- Dekonsentrasi (DK) 204 Satker: Rp2.113.059.057.000,00

Rincian Satuan kerja Kementerian Kesehatan tahun 2016 yang memperoleh APBN menurut jenis kewenangan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Rekapitulasi Satker Menurut Eselon 1

Kode Esln I	Uraian	Jeni-Jenis Kewenangan						Jumlah Satker
		KP		KD		DK		
		M	BM	M	BM	M	BM	
01	Sekretariat Jenderal	13		0		34		47
02	Inspektorat Jenderal	1		0		0		1
03	Ditjen Kesmas	6		3		34		43
04	Ditjen Yankes	6		49		34		89
05	Ditjen P2P	6		59		34		99
07	Ditjen Farmalkes	6		0		34		40
11	Badan Litbang Kes.	5		11		0		16
12	Badan PPSDM Kes.	5		44		34		83
TOTAL		48	0	166	0	204	0	418

Keterangan: M = Melapor, BM = Belum Melapor

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memiliki Satker yang sudah tidak aktif yaitu Satker Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.065 dan 4 satker KP. Sehingga jumlah keseluruhan Satker Kementerian Kesehatan baik aktif maupun in-aktif berdasarkan e-Rekon adalah sebanyak 1.487 satker.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kementerian Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2016 telah mengacu pada SAP, dengan menggunakan aplikasi e-Rekon-LK. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, seluruh unit akuntansi instansi Kementerian Kesehatan agar melakukan pencatatan, pembukuan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan barang dengan berpedoman:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. PMK Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
3. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

4. PMK Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus antara lain:

1. **Dana Jamkesmas**

Untuk sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara telah disajikan dalam Laporan Keuangan **Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan** selaku pengelola DIPA.

Informasi sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara berupa (nama Institusi pemberi pelayanan kesehatan dan nilainya) diperoleh dari data rincian saldo pada Laporan Keuangan TA 2014 (*Audited*) yang pada tahun 2015 belum disetorkan ke Kas Negara atau dokumen sumber SSBP (sebagai bahan input) belum diterima pada Satker Setditjen BUK.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI), atas bukti setor tersebut diserahkan kepada unit eselon 1 untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SPAN pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) Kementerian Keuangan. Terhadap perbedaan antara data SPAN dan SAI maka unit eselon 1 dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyeter atau KPPN setempat. Hasilnya agar *di-entry* oleh Satker terkait.

Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013 dicatat sebagai setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam LRA dan LO sebagai pendapatan non operasional.

2. **Dana Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

Dengan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap, maka terhadap Gaji dan Insentif PTT untuk bulan desember tahun berjalan yang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan pada neraca.

Dalam hal terdapat gaji dan Insentif PTT tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 desember karena belum diterbitkan SPM/SP2Dnya sehingga belum ada realisasi dari kas negara, maka **Satker Biro Umum** harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada neraca. Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA (Kepala Biro Umum).

3. **Tunjangan Kinerja Pegawai**

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terhadap Tunjangan Kinerja Pegawai untuk bulan

desember tahun berjalan, yang dananya telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada neraca.

Dalam hal terdapat Tunjangan Kinerja Pegawai tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember, maka **Satker Biro Umum Setjen, dan/atau Satker Unit Eselon 1 terkait** harus mencatat sebagai Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar pada neraca.

Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA.

4. **Setoran PNBPN yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga**

Setoran PNBPN yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan yang masih menjadi hak Kementerian Kesehatan. PNBPN tersebut didasarkan pada bukti setor SSBPN yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan mulai 1 Januari 2016 setoran menggunakan kode *billing* dari aplikasi SIMPONI.

5. **Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas**

Seluruh PNBPN atas Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013, termasuk setoran pengembalian belanja TAYL dan setoran-setoran lainnya harus dicatat dan disajikan dalam LRA dan LO sebagai pendapatan non operasional. Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBPN atau kode *billing* dari aplikasi SIMPONI, atas bukti setor tersebut diserahkan kepada Unit Eselon 1 untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SAU pada DAPK Kementerian Keuangan. Terhadap perbedaan antara data SAU dan SAI maka Unit Eselon 1 dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyeter atau KPPN setempat. Hasilnya agar *di-entry* oleh satker terkait.

6. **Pengembalian Gaji PTT**

Setoran pengembalian dana gaji Dokter/Bidan PTT, yang berasal dari pengembalian belanja TAYL maupun pengembalian belanja tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan PTT terkait, disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930). Untuk pengembalian belanja atas Dokter/Bidan PTT tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan disetorkan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930).

Dokumen SSBPN maupun SSPB dan menyampaikan bukti setor SSBPN atau kode biling dari aplikasi SIMPONI dan disampaikan ke Satker Biro Umum untuk dibukukan sebagai "**Pendapatan Lain-lain**" atau "**Pengembalian Belanja**" pada LRA dan "**Pendapatan Non Operasional**" atau "Beban Non Operasional" pada LO pada Laporan Keuangan Satker Biro Umum.

7. Satker Vertikal Pemungut PNBP dan penggunaan akun PNBP

Melakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain:

- a. Satker Vertikal pemungut dan pengguna PNBP agar mencantumkan Estimasi Pendapatannya dalam DIPA. Apabila masih terdapat Satker yang belum mencantumkan Estimasi PNBP, segera melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;
- b. Memperhatikan Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011, pendapatan BLU hasil pemanfaatan dana seperti bunga/jasa giro atas dana PNBP BLU, agar dicatat sebagai “Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya” pada akun “424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU”;
- c. Estimasi dan realisasi PNBP Satker Non BLU menggunakan akun “423 Pendapatan PNBP Lainnya”. Akun PNBP secara rinci (6 digit) dapat dilihat pada Lampiran tentang BAS “LRA”. Apabila masih terdapat transaksi PNBP yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada pada tabel referensi agar berkonsultasi dengan KPPN/Dit. APK/Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

8. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Berdasarkan jenisnya, Piutang dibedakan menjadi :

- a. Piutang PNBP berdasarkan pungutan pendapatan negara yang didukung adanya **Surat Penagihan**, meliputi:
 - 1) Piutang hasil pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya;
 - 2) Piutang hasil pelayanan pendidikan;
 - 3) Piutang pendapatan Lainnya.
- b. Piutang PNBP berdasarkan perikatan, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas/jasa milik Kementerian Kesehatan yang didukung **naskah perjanjian sewa-menyewa**, berupa:
 - 1) Penyewaan Gedung Kantor;
 - 2) Penyewaan Rumah Dinas.
- c. Piutang PNBP karena TP/TGR, yang didukung dengan bukti, berupa:
 - 1) **Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan secara damai;
 - 2) **Surat Ketetapan** yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.

Terhadap TP-TGR yang belum didukung SKTJM atau Surat Ketetapan, tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

9. Penyajian Saldo Utang dalam Neraca

- a. **Utang kepada pihak ketiga** adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional (pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya, dan

pelayanan pendidikan) terdiri dari: belanja yang masih harus dibayar, honor, dll. Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diterima dari pihak ketiga tetapi belum dilakukan pembayaran. Pencatatan di neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan.

- b. **Pendapatan diterima dimuka** adalah merupakan penerimaan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa tetapi Satker belum memberikan pelayanan. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja).

Pada akhir periode pelaporan untuk mencatat pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan.

10. Penatausahaan dan Penyisihan Piutang PNB

- a. Penatausahaan Piutang PNB agar mengacu pada:
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Penyisihan Piutang PNB dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca. Penyisihan Piutang PNB mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/X/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan.

11. Konsolidasi Laporan Keuangan Satker BLU ke Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 27 bahwa:

- a. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Penggabungan Laporan Keuangan Satker BLU pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilakukan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengoptimalkan konsolidasi Laporan Keuangan Satker BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan beberapa hal harus diperhatikan pada Satker BLU:

- a. Melakukan tutup tahun anggaran (*cut-off*) periode pelaporan tanggal **31 Desember tahun berjalan**;
- b. Memproses secara tuntas penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari KPPN setempat atas seluruh pendapatan dan belanja bersumber PNBPN;
- c. Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Aplikasi Persediaan, dan SIMAK-BMN secara akurat dan berkualitas yang mencakup seluruh transaksi keuangan dan barang dilengkapi dokumen sumber yang memadai;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP secara berjenjang dan tepat waktu kepada Menteri Kesehatan, dilampirkan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- e. Melakukan sinkronisasi akun atas transaksi keuangan dan barang berdasarkan dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Apabila terdapat perbedaan saldo masing-masing akun dari dua jenis laporan tersebut agar dibuat *mapping* dan menjadi kertas kerja pendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

12. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang diperoleh dari Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa Satker Non BLU mengacu kepada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

Hibah Uang:

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang/Barang/Jasa yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya agar mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
- 2) Berdasarkan BAST maka satker melakukan penginputan secara manual dalam aplikasi SAIBA;
- 3) Setelah Disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL yang sudah dientry maka akan terbentuk jurnal secara otomatis

- pada aplikasi SAIBA;
- 4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun masih terdapat saldo hibah yang telah disahkan namun belum dipakai seluruhnya untuk membiayai pengeluaran maka di Buku Besar Akrual/Neraca akan muncul dalam aplikasi SAIBA;

Untuk sisa dana hibah berupa mata uang selain rupiah agar dikonversi dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI per tanggal pelaporan.

Hibah Barang:

Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada SAIBA di input dalam aplikasi SAIBA.

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka diinput dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN;
- 2) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka diinput dalam aplikasi SAIBA.

Hibah Jasa:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka pada SAIBA diinput dalam aplikasi SAIBA;
- 2) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka pada diinput dalam aplikasi SAIBA.

b. Hibah Uang/Barang/Jasa Satker BLU mengikuti ketentuan dalam pengelolaan BLU

1) Hibah berbentuk uang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk uang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU bukan sebagai pendapatan BA 999.02 (Pengelola Hibah) sehingga tidak perlu melakukan registrasi hibah kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dalam hal BLU menggunakan pendapatan hibah tersebut untuk mendanai pengeluaran belanja, Satker BLU melakukan revisi DIPA (jika pagu atas belanja terkait sudah terlampaui, tidak ada atau kurang). Selanjutnya pendapatan dan realisasi belanja yang di danai dari hibah di cantumkan dalam surat SP3B dan disampaikan kepada KPPN untuk mendapat pengesahan menjadi SP2B.

2) Hibah berbentuk barang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Barang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam LRA melainkan hanya dilaporkan dalam LO.

3) Hibah berbentuk Jasa

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Jasa mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam LRA melainkan hanya dilaporkan dalam LO.

13. Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan

- a. Pembukuan Persediaan yang diperoleh dari APBN dilakukan pada Aplikasi Persediaan-sub sistem SIMAK-BMN oleh Satker yang mengadakan persediaan;
- b. Pengalihan/Hibah BMN (Aset tetap dan Persediaan) Kemenkes kepada SKPD/pihak lain tanpa memperoleh penggantian mengacu pada PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;
- c. Penyerahan Pengalihan/hibah BMN tersebut dibuktikan dengan penandatanganan BAST sementara antara kedua belah pihak. BMN tersebut masih dicatat dan dilaporkan oleh Satker yang mengadakan/mengirimkan sampai dengan diterbitkannya persetujuan hibah dari pengelola barang dan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang;
- d. Setiap perubahan/mutasi BMN dan koreksi nilai BMN harus didasarkan BAST, dokumen kepemilikan, memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah;
- e. Satker RS BLU dapat membukukan barang Persediaan Farmasi menggunakan Aplikasi Persediaan Farmasi selain Aplikasi Persediaan-SIMAK-BMN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu;
- f. Pelaporan barang persediaan Satker RS BLU pada setiap periode pelaporan wajib disajikan melalui Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1284/PB.6/2011 perihal Aplikasi Barang Persediaan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kodifikasi barang persediaan yang belum terakomodir dalam *database* Aplikasi Persediaan dapat menggunakan kodifikasi barang yang mendekati;
 - 2) Barang Persediaan yang dikarenakan keterbatasan aplikasi Persediaan sesuai SAP khususnya pada Satuan Kerja BLU Rumah Sakit dapat dilaporkan secara global/per jenis barang dan sub-sub kelompok disajikan berdasarkan *stock opname* (diinput dengan menu *stock opname* pada aplikasi persediaan sebesar selisih *stock opname* setelah dikurangi saldo awal), dengan tetap memperhitungkan nilai pembelian maupun beban agar dapat disajikan didalam aplikasi SAIBA.

14. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jika Satker mempunyai KDP berbentuk fisik, penghapusan KDP tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal KDP yang tidak berbentuk fisik seperti: dokumen perencanaan, honor, dll, penghapusan KDP tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pengelola Barang, cukup dengan surat pernyataan KPA yang menginformasikan bahwa pembangunan fisik tidak dilanjutkan lagi.

15. BMN pada Satuan Kerja yang tidak menerima DIPA pada TA berjalan (Satker Non Aktif)

Satker Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan dan Biro Keuangan dan BMN

selaku penanggungjawab Unit Eselon 1 bertanggungjawab untuk melaporkan BMN yang berada pada Satker Non Aktif di lingkungan Unit Eselon 1 masing-masing.

16. **BMN (Aset Tetap) BLU yang masih harus dibayar**

Sesuai dengan karakteristik BLU, Satker BLU dapat memperoleh aset tetap melalui utang. Jika Satker BLU memperoleh aset definitif melalui utang, aset tersebut dicatat sebagai aset BLU dan mengakui adanya utang.

Aset tetap BLU yang diperoleh dari utang disusutkan sejak aset tetap tersebut dimiliki/dikuasai oleh Satker BLU. Untuk itu Satker BLU ketika memperoleh aset tetap dimaksud memasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi BMN “pembelian” dengan menggunakan tanggal dan nomor BAST. Pencatatan aset tetap tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara penambahan aset tetap dengan realisasi belanja modal pada periode pencatatan aset tetap maupun pada periode pembayaran utang. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam CaLK.

Pada saat pembayaran hutang, SP3B/SP2B yang diterbitkan oleh Satker BLU tidak perlu dimasukan lagi ke SIMAK BMN.

17. **Kerjasama Operasi/Kemitraan Satker BLU dengan Pihak Ketiga**

Kerjasama Operasi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kerjasama operasi tersebut didasarkan pada peraturan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PA BLU) maupun Pedoman Akuntansi BLU yang mengatur kerjasama operasi pada BLU Poltekes.

18. **Pencatatan BMN yang berasal dari DK/TP**

- a. Jika Satker DK/TP merealisasikan belanja untuk penunjang kegiatan menggunakan Belanja Barang (52....) maka aset dicatat dalam Aplikasi Persediaan dan penghibahan mengacu PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan batas waktu enam bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum dihibahkan, maka **direklasifikasi** menjadi aset tetap dan proses penghibahannya mengacu PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.
- b. BMN dibawah penguasaan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun 2011 dan BMN yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tidak disajikan sebagai aset pada Neraca Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I, dan Kemenkes tetapi tetap dicatat di Aplikasi SIMAK-BMN untuk penatausahaan dengan menggunakan menu **”Penghentian BMN dari Penggunaan”**.
- c. Proses Hibah BMN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun 2011 mengacu kepada PMK Nomor

104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

- d. Mencatat BMN penunjang kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran berjalan dalam aplikasi persediaan termasuk barang penunjang kegiatan Dekonsentrasi yang menggunakan akun 52xx.
- e. Melakukan proses reklasifikasi BMN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebelum tahun anggaran 2011 menjadi “Aset yang dihentikan dari operasional pemerintah/Aset lain-lain” sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 98/PMK.06/2013.
- f. Dalam hal aset berbentuk KDP, sesuai dengan paragraf 15 PSAP 08 menyatakan bahwa “Suatu KDP akan dipindahkan ke pos Aset tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan dengan dokumen sumber Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)”.

19. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset tetap dalam Neraca Kementerian Kesehatan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- KDP
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. **Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus** yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Semesteran, sedangkan untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Tahunan.

Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

20. Klaim Biaya Pelayanan

Selisih klaim biaya pelayanan kepada BPJS, Jamkesda, Asuransi, dan selisih klaim pasien Non PBI yang berpotensi tidak terbayar menimbulkan beban yang harus ditanggung rumah sakit sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai beban operasional rumah sakit (beban biasa) yang akan dilaporkan dalam LO.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN.
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam CaLK.

Beban

(4) Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam CaLK.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Untuk piutang yang berasal dari pelayanan atas pasien BPJS pada Satker BLU dicatat sebesar nilai yang belum dibayar atas tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh BPJS. Adapun tagihan yang belum selesai diverifikasi informasinya disajikan dalam CaLK. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Kualitas Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

7) Persediaan BLU Rumah Sakit

Dengan terbitnya surat Dirjen Perbendaharaan nomor S261/PB/2016 tanggal 12 Januari 2016 hal Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015, maka Satker BLU di lingkup Kementerian Kesehatan dalam menilai persediaan BLU dapat diukur dengan menggunakan metode FIFO, Rata-Rata atau Harga Pembelian Terakhir.

Pengukuran Saldo Persediaan dan Beban Persediaan dapat menggunakan Aplikasi Persediaan maupun sistem yang dibangun sendiri oleh BLU yang dapat mendukung pengukuran nilai dan beban persediaan BLU secara andal.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- 5) Mengidentifikasi BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya agar tidak disajikan dalam neraca setelah pengguna barang/kuasa pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) KDP; dan
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- 5) Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang***d. Piutang Jangka Panjang**

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, TPA yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat ATB adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Penggolongan Masa Manfaat ATB

Kelompok ATB	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban**(6) Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban pada Kementerian Kesehatan berupa kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Kesehatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi

(dalam rupiah)

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PNBP Lainnya	519.429.223.580,00	519.429.223.580,00
Pendapatan BLU	9.763.932.634.945,00	9.763.932.634.945,00
Jumlah Pendapatan	10.283.361.858.525,00	10.283.361.858.525,00
Belanja		
Belanja Pegawai	7.703.132.293.000,00	7.237.181.088.000,00
Belanja Barang	25.010.970.315.000,00	26.701.830.766.000,00
Belanja Modal	5.448.500.002.000,00	6.221.181.143.000,00
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000,00	25.502.400.000.000,00
Jumlah Belanja	63.665.002.610.000,00	65.662.592.997.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi

(dalam rupiah)

PROGRAM	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	29.947.778.070.000,00	29.614.669.816.000,00
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.334.290.815.000,00	1.048.691.657.000,00
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.988.287.930.000,00	2.638.851.122.000,00
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.968.899.408.000,00	18.511.935.411.000,00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.089.303.688.000,00	4.580.562.750.000,00
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.165.850.646.000,00	3.251.823.220.000,00
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.065.592.053.000,00	5.911.059.021.000,00
Total Belanja	63.665.002.610.000,00	65.662.592.997.000,00

Realisasi
Pendapatan

B.1 PENDAPATAN**B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.650.421.987.370,00 atau mencapai 103,57% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.283.361.858.525,00. Pendapatan Negara dan Hibah (*netto*) bersumber dari PNBP berupa:

B.1.1.1 PNBP Lainnya

PNBP Lainnya sebesar Rp887.498.790.803,00 atau mencapai 170,86% dari estimasi pendapatan PNBP Lainnya yang ditetapkan sebesar Rp519.429.223.580,00.

B.1.1.2 Pendapatan BLU

Pendapatan BLU sebesar Rp9.762.923.196.567,00 atau mencapai 99,99% dari estimasi pendapatan BLU yang ditetapkan sebesar Rp9.763.932.634.945,00.

Rincian Perbandingan Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PNBP Lainnya	519.429.223.580,00	887.498.790.803,00	170,86
Pendapatan BLU	9.763.932.634.945,00	9.762.923.196.567,00	99,99
Jumlah	10.283.361.858.525,00	10.650.421.987.370,00	103,57

Perbandingan Estimasi Pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 21
Rincian Estimasi Pendapatan PNBP TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	31-Des-16	31-Des-15	Bertambah (berkurang)	%
Akun 423 - PNBP Lainnya					
1	Pendapatan Penjualan dan Sewa	130.175.488,00	456.667.268,00	(326.491.780,00)	(71,49)
2	Pendapatan Jasa	251.580.556.891,00	233.587.883.384,00	17.992.673.507,00	7,7
3	Pendapatan Pendidikan	267.692.491.201,00	282.640.942.737,00	(14.948.451.536,00)	(5,29)
4	Pendapatan Iuran dan Denda	6.000.000,00	0	6.000.000,00	
5	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	16.809.771,00	3.190.229,00	18,98
Sub total PNBP Lainnya		519.429.223.580,00	516.702.303.160,00	2.726.920.420,00	0,53
Akun 424 - Pendapatan BLU					
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	9.644.306.218.455,00	8.535.804.682.000,00	1.108.501.536.455,00	12,99
2	Pendapatan Hibah BLU	6.055.676.000,00	3.601.809.000,00	2.453.867.000,00	68,13
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	59.846.833.500,00	39.074.214.000,00	20.772.619.500,00	53,16
4	Pendapatan BLU Lainnya	53.723.906.990,00	48.739.800.000,00	4.984.106.990,00	10,23
Sub total Pendapatan BLU		9.763.932.634.945,00	8.627.220.505.000,00	1.136.712.129.945,00	13,18
TOTAL		10.283.361.858.525,00	9.143.922.808.160,00	1.139.439.050.365,00	12,46

Estimasi pendapatan PNBP TA 2016 sebesar Rp10.283.361.858.525,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.139.439.050.365,00 atau meningkat sebesar 12,46% dari estimasi pendapatan tahun yang lalu, dengan peningkatan Pendapatan BLU sebesar Rp1.136.712.129.945,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp2.726.920.420,00.

Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015 terdapat kenaikan sebesar 3,29%. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan lain-lain.

Tabel 22
Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan BLU	9.762.923.196.567,00	9.629.739.341.485,00	1,38
Pendapatan Lain-lain	887.498.790.803,00	681.762.139.445,00	30,18
Jumlah	10.650.421.987.370,00	10.311.501.480.930,00	3,29

Rincian Perbandingan realisasi Pendapatan PNBP (*Netto*) TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 23
Rincian Realisasi PNBP TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
PNBP Lainnya					
1	Pendapatan Penjualan dan Sewa	6.010.741.445,00	5.829.161.563,00	181.579.882,00	3,12
2	Pendapatan Jasa	404.994.494.184,00	329.665.532.854,00	75.328.961.330,00	22,85
3	Pendapatan Bunga		11.536,00	(11.536,00)	(100,00)
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan		36.312,00	(36.312,00)	(100,00)
5	Pendapatan Pendidikan	266.666.574.196,00	248.165.613.926,00	18.500.960.270,00	7,46
6	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	525.830.955,00	47.630.145,00	478.200.810,00	1.003,99
7	Pendapatan Iuran dan Denda	32.053.029.474,00	13.480.594.921,00	18.572.434.553,00	137,77
8	Pendapatan Lain-lain	177.248.120.549,00	84.573.558.188,00	92.674.562.361,00	109,58
Sub total PNBP Lainnya		887.498.790.803,00	681.762.139.445,00	205.736.651.358,00	30,18
Pendapatan BLU					
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	9.545.145.246.718,00	9.409.177.118.836,00	135.968.127.882,00	1,45
2	Pendapatan Hibah BLU	6.557.600.605,00	2.655.469.565,00	3.902.131.040,00	146,95
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	87.935.095.606,00	80.267.929.400,00	7.667.166.206,00	9,55
4	Pendapatan BLU Lainnya	123.285.253.638,00	137.638.823.684,00	(14.353.570.046,00)	(10,43)
Sub total Pendapatan BLU		9.762.923.196.567,00	9.629.739.341.485,00	133.183.855.082,00	1,38
Sub Total Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.650.421.987.370,00	10.311.501.480.930,00	338.920.506.440,00	3,29

Realisasi Pendapatan PNBP TA 2016 sebesar Rp10.650.421.987.370,00 mengalami peningkatan sebesar Rp338.920.506.440,00 atau meningkat 3,29% dari realisasi pendapatan PNBP tahun lalu. Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.

- a. PNBP Lainnya, mengalami peningkatan yaitu :
- 1) Pendapatan Jasa, meningkat sebesar Rp75.328.961.330,00.
 - 2) Pendapatan Pendidikan, meningkat sebesar Rp18.500.960.270,00.

Secara keseluruhan PNBP dari Akun 423 mengalami kenaikan sebesar Rp205.736.651.358,00 atau 30,18%.

- b. Pendapatan BLU, mengalami peningkatan, yaitu :
- 1) Pendapatan Jasa Layanan Umum, meningkat sebesar Rp135.968.127.882,00.
 - 2) Pendapatan Hibah BLU, meningkat sebesar Rp3.902.131.040,00.
 - 3) Pendapatan hasil kerjasama BLU, meningkat sebesar Rp7.667.166.206,00.

*Realisasi
Belanja*

B.2 BELANJA

Realisasi belanja Kementerian Kesehatan pada TA 2016 adalah sebesar Rp57.011.202.253.509,00 atau 86,82% dari anggaran belanja sebesar Rp65.662.592.997.000,00. Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN-P TA 2016, maka pagu anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp65.662.592.997.000,00 setelah efisiensi menjadi sebesar Rp62.720.934.203.000,00. Dari pagu setelah efisiensi terdapat *self blocking* sebesar Rp5.552.316.839.000,00 dengan memperhitungkan penambahan dari PNPB dan BLU serta Hibah Langsung sebesar Rp874.344.830.000,00, maka pagu akhir menjadi Rp58.042.962.194.000,00. Sehingga apabila realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan di hitung setelah penghematan belanja K/L menjadi 98,22%.

Anggaran dan Realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

(dalam rupiah)

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.237.181.088.000,00	6.632.108.148.885,00	91,64
Belanja Barang	26.701.830.766.000,00	20.795.758.286.293,00	77,88
Belanja Modal	6.221.181.143.000,00	4.768.351.966.206,00	76,65
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000,00	24.814.983.852.125,00	97,30
Total Belanja	65.662.592.997.000,00	57.011.202.253.509,00	86,82

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 menurut program tersaji pada tabel berikut:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2016

(dalam rupiah)

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	29.614.669.816.000,00	28.477.468.532.772,00	96,16
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	105.000.000.000,00	95.147.660.137,00	90,62
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.048.691.657.000,00	733.493.190.525,00	69,94
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.638.851.122.000,00	1.644.560.585.637,00	62,32
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	18.511.935.411.000,00	15.819.776.577.212,00	85,46
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.580.562.750.000,00	3.476.545.322.041,00	75,90
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.251.823.220.000,00	2.723.129.974.694,00	83,74
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.911.059.021.000,00	4.041.080.410.491,00	68,36
TOTAL		65.662.592.997.000,00	57.011.202.253.509,00	86,82

Perbandingan Anggaran TA 2016 dan 2015 menurut Program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26
Anggaran menurut Program TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No.	Program	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	29.614.669.816.000,00	24.283.609.878.000,00	5.331.059.938.000,00	21,95
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	105.000.000.000,00	102.971.000.000,00	2.029.000.000,00	1,97
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.048.691.657.000,00	759.126.196.000,00	289.565.461.000,00	38,14
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.638.851.122.000,00	2.717.469.698.000,00	(78.618.576.000,00)	(2,89)
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	18.511.935.411.000,00	18.852.255.673.000,00	(340.320.262.000,00)	(1,81)
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.580.562.750.000,00	2.697.326.439.000,00	1.883.236.311.000,00	69,82
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.251.823.220.000,00	1.863.969.679.000,00	1.387.853.541.000,00	74,46
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.911.059.021.000,00	3.060.790.867.000,00	2.850.268.154.000,00	93,12
TOTAL		65.662.592.997.000,00	54.337.519.430.000,00	11.325.073.567.000,00	20,84

Anggaran tahun 2016 sebesar Rp65.662.592.997.000,00 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp11.325.073.567.000,00 atau 20,84%. Peningkatan terbesar yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya meningkat sebesar Rp5.331.059.938.000,00 juga terdapat penurunan anggaran yaitu pada program pembinaan kesehatan masyarakat dan program pembinaan pelayanan kesehatan.

Perbandingan realisasi belanja (*Netto*) TA 2016 dan 2015 menurut program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27
Realisasi Belanja menurut Program TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No.	Program	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	28.477.468.532.772,00	22.905.235.230.282,00	5.572.233.302.490,00	24,33
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	95.147.660.137,00	82.715.773.073,00	12.431.887.064,00	15,03
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	733.493.190.525,00	552.341.800.113,00	181.151.390.412,00	32,80
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.644.560.585.637,00	2.332.666.144.087,00	(688.105.558.450,00)	(29,50)
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.819.776.577.212,00	16.246.097.578.241,00	(426.321.001.029,00)	(2,62)
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.476.545.322.041,00	2.245.508.557.640,00	1.231.036.764.401,00	54,82
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.723.129.974.694,00	1.768.111.736.232,00	955.018.238.462,00	54,01
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.041.080.410.491,00	2.719.954.630.930,00	1.321.125.779.561,00	48,57
TOTAL		57.011.202.253.509,00	48.852.631.450.598,00	8.158.570.802.911,00	16,70

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp57.011.202.253.509,00 dibandingkan realisasi belanja tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp8.158.570.802.911,00 atau meningkat 16,70%. Realisasi dengan peningkatan terbesar yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya meningkat sebesar Rp5.572.233.302.490,00.

Menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

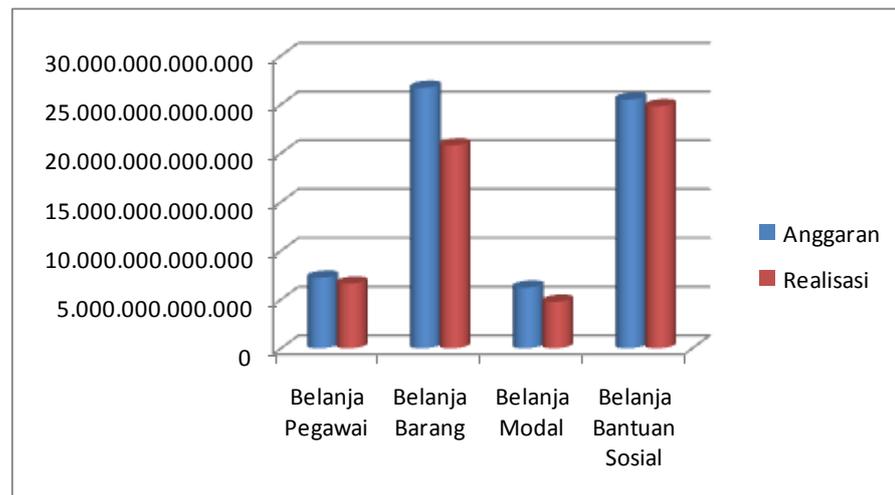
Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2016
(dalam rupiah)

Kode	Jenis Belanja	2016		%
		Alokasi	Realisasi	
51	Belanja Pegawai	7.237.181.088.000,00	6.632.108.148.885,00	91,64
52	Belanja Barang	26.701.830.766.000,00	20.795.758.286.293,00	77,88
53	Belanja Modal	6.221.181.143.000,00	4.768.351.966.206,00	76,65
57	Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000,00	24.814.983.852.125,00	97,30
Jumlah		65.662.592.997.000,00	57.011.202.253.509,00	86,82

Realisasi Belanja TA 2016 sebesar Rp57.011.202.253.509,00 atau 86,82% dari anggaran sebesar Rp65.662.592.997.000,00. Secara prosentase, realisasi belanja dengan penyerapan tertinggi yaitu Belanja Bantuan Sosial mencapai 97,30% digunakan untuk program JKN dalam bentuk program bantuan iuran.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016



Perbandingan Anggaran TA 2016 dan 2015 menurut jenis belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Anggaran menurut Jenis Belanja TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Kode	Jenis Belanja	Alokasi		Kenaikan (Penurunan)	%
		2016	2015		
51	Belanja Pegawai	7.237.181.088.000,00	6.686.839.504.000,00	550.341.584.000,00	8,23
52	Belanja Barang	26.701.830.766.000,00	20.417.683.526.000,00	6.284.147.240.000,00	30,78
53	Belanja Modal	6.221.181.143.000,00	6.872.916.400.000,00	(651.735.257.000,00)	(9,48)
57	Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000,00	20.360.080.000.000,00	5.142.320.000.000,00	25,26
	Jumlah	65.662.592.997.000,00	54.337.519.430.000,00	11.325.073.567.000,00	20,84

Anggaran tahun 2016 sebesar Rp65.662.592.997.000,00 dibandingkan tahun 2015, mengalami peningkatan sebesar Rp11.325.073.567.000,00 atau meningkat 20,84%, peningkatan terbesar yaitu Belanja Barang sebesar Rp6.284.147.240.000,00.

Perbandingan realisasi belanja (*netto*) TA 2016 dan 2015 menurut Jenis Belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Belanja (*Netto*) TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	%
Belanja Pegawai	6.632.108.148.885,00	5.743.406.994.244,00	15,47
Belanja Barang	20.795.758.286.293,00	18.030.159.357.767,00	15,34
Belanja Modal	4.768.351.966.206,00	5.194.700.813.387,00	(8,21)
Belanja Bantuan Sosial	24.814.983.852.125,00	19.884.364.285.200,00	24,80
Jumlah	57.011.202.253.509,00	48.852.631.450.598,00	16,70

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp57.011.202.253.509,00 dibandingkan Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp8.158.570.802.911,00 atau meningkat 16,70%. Peningkatan terbesar yaitu Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.930.619.566.925,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing menurut Eselon 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016
 (dalam rupiah)

BA - ES 1	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja				
			Bruto	%	Pengembalian	Netto	%
02401 Setjen	51 Bel. Pegawai	2.924.299.248.000,00	2.788.438.595.735,00	95,35	5.745.824.408,00	2.782.692.771.327,00	95,16
	52 Bel. Barang	1.074.946.753.000,00	818.979.885.736,00	76,19	8.908.719.659,00	810.071.166.077,00	75,36
	53 Bel. Modal	113.023.815.000,00	69.720.743.243,00	61,69	0,00	69.720.743.243,00	61,69
	57 Ban.Sosial	25.502.400.000.000,00	24.814.983.852.125,00	97,30	0,00	24.814.983.852.125,00	97,30
02401 Total		29.614.669.816.000,00	28.492.123.076.839,00	96,21	14.654.544.067,00	28.477.468.532.772,00	96,16
02402 Itjen	51 Bel. Pegawai	39.329.019.000,00	33.190.795.591,00	84,39	94.121.496,00	33.096.674.095,00	84,15
	52 Bel. Barang	62.147.452.000,00	60.168.802.392,00	96,82	742.805.150,00	59.425.997.242,00	95,62
	53 Bel. Modal	3.523.529.000,00	2.624.988.800,00	74,50	0,00	2.624.988.800,00	74,50
02402 Total		105.000.000.000,00	95.984.586.783,00	91,41	836.926.646,00	95.147.660.137,00	90,62
02403 Ditjen Kesmas	51 Bel. Pegawai	58.328.368.000,00	54.553.320.157,00	93,53	237.124.077,00	54.316.196.080,00	93,12
	52 Bel. Barang	2.552.798.855.000,00	1.577.410.090.703,00	61,79	10.755.958.168,00	1.566.654.132.535,00	61,37
	53 Bel. Modal	27.723.899.000,00	23.594.634.800,00	85,11	4.377.778,00	23.590.257.022,00	85,09
02403 Total		2.638.851.122.000,00	1.655.558.045.660,00	62,74	10.997.460.023,00	1.644.560.585.637,00	62,32
02404 Ditjen Yankes	51 Bel. Pegawai	2.450.178.615.000,00	2.213.557.424.443,00	90,34	4.257.639.150,00	2.209.299.785.293,00	90,17
	52 Bel. Barang	12.052.826.608.000,00	10.445.451.582.257,00	86,66	6.953.384.201,00	10.438.498.198.056,00	86,61
	53 Bel. Modal	4.008.930.188.000,00	3.172.508.114.827,00	79,14	529.520.964,00	3.171.978.593.863,00	79,12
02404 Total		18.511.935.411.000,00	15.831.517.121.527,00	85,52	11.740.544.315,00	15.819.776.577.212,00	85,46
02405 Ditjen P2PL	51 Bel. Pegawai	483.457.329.000,00	426.457.210.941,00	88,21	3.337.476.266,00	423.119.734.675,00	87,52
	52 Bel. Barang	3.570.732.436.000,00	2.620.268.316.667,00	73,38	11.431.924.942,00	2.608.836.391.725,00	73,06
	53 Bel. Modal	526.372.985.000,00	444.608.945.752,00	84,47	19.750.111,00	444.589.195.641,00	84,46
02405 Total		4.580.562.750.000,00	3.491.334.473.360,00	76,22	14.789.151.319,00	3.476.545.322.041,00	75,90
02407 Ditjen Binarf	51 Bel. Pegawai	35.500.000.000,00	28.657.290.233,00	80,72	62.133.224,00	28.595.157.009,00	80,55
	52 Bel. Barang	3.208.505.386.000,00	2.700.820.828.002,00	84,18	12.755.689.136,00	2.688.065.138.866,00	83,78
	53 Bel. Modal	7.817.834.000,00	6.469.878.819,00	82,76	200.000,00	6.469.678.819,00	82,76
02407 Total		3.251.823.220.000,00	2.735.947.997.054,00	84,14	12.818.022.360,00	2.723.129.974.694,00	83,74
02411 Balitbang	51 Bel. Pegawai	156.802.448.000,00	146.954.113.537,00	93,72	1.406.169.537,00	145.547.944.000,00	92,82
	52 Bel. Barang	764.036.086.000,00	545.276.559.148,00	71,37	20.231.773.815,00	525.044.785.333,00	68,72
	53 Bel. Modal	127.853.123.000,00	62.900.461.192,00	49,20	0,00	62.900.461.192,00	49,20
02411 Total		1.048.691.657.000,00	755.131.133.877,00	72,01	21.637.943.352,00	733.493.190.525,00	69,94
02412 PPSDM	51 Bel. Pegawai	1.089.286.061.000,00	957.687.833.009,00	87,92	2.247.946.603,00	955.439.886.406,00	87,71
	52 Bel. Barang	3.415.837.190.000,00	2.141.535.888.327,00	62,69	42.373.411.868,00	2.099.162.476.459,00	61,45
	53 Bel. Modal	1.405.935.770.000,00	986.490.155.559,00	70,17	12.107.933,00	986.478.047.626,00	70,17
02412 Total		5.911.059.021.000,00	4.085.713.876.895,00	69,12	44.633.466.404,00	4.041.080.410.491,00	68,36
Grand Total		65.662.592.997.000,00	57.143.310.311.995,00	87,03	132.108.058.486,00	57.011.202.253.509,00	86,82

*Belanja
Pegawai*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.632.108.148.885,00 dan Rp5.743.406.994.244,00 atau terjadi peningkatan sebesar 15,47% dari tahun lalu.

Tabel 32
Realisasi Belanja Pegawai (Netto) TA 2016 dan 2015
 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.460.599.585.938,00	3.275.218.214.110,00	5,66
Belanja Gaji Dokter PTT	1.480.716.666.342,00	1.013.177.484.384,00	46,15
Belanja Gaji Dan Tunjangan Non PNS	1.262.781.055,00	1.308.927.181,00	(3,53)
Belanja Honorarium	1.047.387.310.102,00	810.364.051.400,00	29,25
Belanja Lembur	31.806.889.850,00	30.347.524.400,00	4,81
Biaya Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transiso	610.334.915.598,00	612.990.792.769,00	(0,43)
Jumlah Belanja	6.632.108.148.885,00	5.743.406.994.244,00	15,47

Belanja Barang B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp20.795.758.286.293,00 dan Rp18.030.159.357.767,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 15,34% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015.

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Belanja Barang (Netto) TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Naik/Turun %
Belanja Barang Operasional	707.756.371.985,00	764.782.684.768,00	(7,46)
Belanja Barang Non Operasional	1.538.264.697.164,00	1.906.976.332.714,00	(19,33)
Belanja Barang Persediaan	860.687.605.662,00	475.298.575.780,00	81,08
Belanja Jasa	1.137.029.615.571,00	904.612.536.282,00	25,69
Belanja Pemeliharaan	428.132.113.216,00	390.276.345.736,00	9,70
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.626.086.943.007,00	1.543.911.135.177,00	70,09
Belanja Perjalanan Luar Negeri	149.869.489.058,00	77.285.697.425,00	93,92
Belanja Barang BLU	8.841.118.659.097,00	8.698.213.944.811,00	1,64
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.279.442.534.211,00	1.583.025.394.424,00	(19,18)
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah	6.288.337.696,00	6.626.229.223,00	(5,10)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.221.081.919.626,00	1.679.150.481.427,00	91,83
Jumlah Belanja	20.795.758.286.293,00	18.030.159.357.767,00	15,34

Belanja Modal B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.768.351.966.206,00 dan Rp5.194.700.813.387,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 8,21% dibandingkan TA 2015.

Tabel 34
Realisasi Belanja Modal (Netto) TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Naik/Turun %
Belanja Modal Tanah	82.409.959.758,00	76.993.901.114,00	7,03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.308.690.877.929,00	2.815.789.551.904,00	(18,01)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.343.975.118.430,00	1.482.365.677.312,00	(9,34)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.405.925.400,00	4.125.898.130,00	370,34
Belanja Modal Lainnya	22.723.641.460,00	98.320.743.203,00	(76,89)
Belanja Modal BLU	991.146.443.229,00	717.105.041.724,00	38,21
Jumlah Belanja	4.768.351.966.206,00	5.194.700.813.387,00	(8,21)

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp82.409.959.758,00 dan Rp76.993.901.114,00. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Realisasi Belanja Modal Tanah (Netto) TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	80.370.721.599,00	76.343.296.030,00	5,28
Belanja Modal pembebasan Tanah	107.985.600,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	533.672.000,00	111.300.000,00	379,49
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	134.535.300,00	15.000.000,00	796,90
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	671.691.175,00	363.271.000,00	84,90
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	13.964.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	577.390.084,00	161.034.084,00	258,55
Jumlah Belanja Netto	82.409.959.758,00	76.993.901.114,00	7,03

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.308.690.877.929,00 dan Rp2.815.789.551.904,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 18,01% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 36
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto) TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.307.502.774.199,00	2.813.741.174.604,00	(17,99)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	189.763.500,00	129.820.000,00	46,17
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	90.910.000,00	2.044.500,00	4.346,56
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	660.170.000,00	0,00	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	60.960.230,00	58.913.000,00	3,48
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	186.300.000,00	1.857.599.800,00	(89,97)
Jumlah Belanja Netto	2.308.690.877.929,00	2.815.789.551.904,00	(18,01)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.343.975.118.430,00 dan Rp1.482.385.677.312,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 9,34% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 37
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Netto) TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2016	T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.256.327.133.958,00	1.361.496.260.533,00	(7,72)
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0,00	6.288.511.500,00	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	2.436.229.057,00	1.020.873.440,00	138,64
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	16.864.607.330,00	9.042.995.675,00	86,49
Belanja Modal Perijinan Gedung dan Bangunan	21.965.036,00	0,00	
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	380.493.967,00	77.212.000,00	392,79
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	67.944.689.082,00	104.459.824.164,00	(34,96)
Jumlah Belanja Netto	1.343.975.118.430,00	1.482.385.677.312,00	(9,34)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.405.925.400,00 dan Rp4.125.898.130,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 370,34% dibandingkan realisasi tahun 2015.

Tabel 38
Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan (Netto) TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2016	T.A. 2015	Naik (Turun)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.032.335.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	3.150.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	161.896.752,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi	1.016.354.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Jaringan	6.877.854.288,00	3.586.802.130,00	91,75
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	23.657.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	219.508.000,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	6.071.170.360,00	539.096.000,00	1026,18
Jumlah Belanja Netto	19.405.925.400,00	4.125.898.130,00	370,34

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp22.723.641.460,00 dan Rp98.320.743.203,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 76,89% dibandingkan realisasi tahun 2015.

Tabel 39
Realisasi Belanja Modal Lainnya (Netto) TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2016	T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	22.502.466.460,00	98.129.419.203,00	(77,07)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	221.175.000,00	191.324.000,00	15,60
Jumlah Belanja Netto	22.723.641.460,00	98.320.743.203,00	(76,89)

B.2.3.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp991.146.443.229,00 dan Rp717.105.041.724,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 38,21% dibandingkan realisasi tahun 2015.

Tabel 40
Realisasi Belanja Modal BLU (Netto) TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2016	T.A. 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah BLU	2.484.517.500,00	974.600.000,00	154,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	609.586.721.431,00	471.732.388.572,00	29,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	344.369.548.846,00	216.807.517.277,00	58,84
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan BLU	13.381.659.720,00	5.841.770.959,00	129,07
Belanja Modal Lainnya BLU	21.323.995.732,00	21.748.764.916,00	(1,95)
Jumlah Belanja Netto	991.146.443.229,00	717.105.041.724,00	38,21

Belanja Bantuan Sosial

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.814.983.852.125,00 dan Rp19.884.364.285.200,00 atau mengalami kenaikan sebesar 24,80% dari tahun 2015. Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan untuk PBI.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA*Aset Lancar***ASET LANCAR**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp7.811.531.902.898,00 dan Rp5.853.058.939.701,00. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagai berikut:

Tabel 41
Daftar Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1116	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.399.069.596,00	1.827.265.090,00
1117	Kas Di Bendahara Penerimaan	616.914.118,00	679.520.034,00
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	484.358.461.194,00	509.571.905.312,00
1119	Kas pada BLU	2.350.139.199.167,00	2.469.954.947.858,00
1133	Investasi Jangka Pendek - BLU	283.078.842.932,00	232.605.000.000,00
1141	Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	114.879.203.713,00	21.766.791.441,00
1142	Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	949.749.028,00	0,00
1143	Pendapatan yang masih harus diterima	1.723.122.231,00	6.770.401.520,00
1152	Piutang Bukan Pajak	28.597.016.130,00	54.076.509.981,00
1162	<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</i>	<i>(1.712.825.512,00)</i>	<i>(3.801.981.284,00)</i>
	Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	26.884.190.618,00	50.274.528.697,00
1154	Bagian Lancar TP-TGR	629.935.089,00	168.686.744,00
1164	<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP-TGR</i>	<i>(50.412.175,00)</i>	<i>(2.294.433,00)</i>
	Bagian Lancar TP-TGR (<i>Netto</i>)	579.522.914,00	166.392.311,00
1157	Piutang Kegiatan Operasional BLU	2.009.415.810.944,00	1.119.369.981.747,00
1166	<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional BLU</i>	<i>(359.456.896.438,00)</i>	<i>(292.387.905.301,00)</i>
	Piutang Kegiatan Operasional BLU (<i>Netto</i>)	1.649.958.914.506,00	826.982.076.446,00
1158	Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	4.092.738.621,00	2.622.480.125,00
1167	<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional BLU</i>	<i>(694.128.343,00)</i>	<i>(435.177.182,00)</i>
	Piutang Kegiatan Non Operasional BLU (<i>Netto</i>)	3.398.610.278,00	2.187.302.943,00
1171	Persediaan	2.081.621.562.988,00	944.864.695.500,00
1172	Persediaan - BLU	811.944.539.615,00	785.408.112.549,00
	Jumlah	7.811.531.902.898,00	5.853.058.939.701,00

Saldo Aset Lancar 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp1.958.472.963.197,00 atau meningkat sebesar 33,46% dengan peningkatan terbesar pada akun:

- Persediaan, meningkat sebesar Rp1.136.756.867.488,00;
- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU, meningkat sebesar Rp890.045.829.197,00;
- Belanja Dibayar Dimuka, meningkat sebesar Rp93.112.412.272,00;
- Investasi Jangka Pendek BLU, meningkat sebesar Rp50.473.842.932,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.399.069.596,00 dan Rp1.827.265.090,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.399.069.596,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp608.233.596,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp790.836.000,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon 1 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 42
Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	23.012.000,00	543.595.522,00	(520.583.522,00)
024.03	DITJEN KESMAS	143.017.935,00	367.472.652,00	(224.454.717,00)
024.04	DITJEN YANKES	642.310.322,00	270.243.719,00	372.066.603,00
024.05	DITJEN P2P	1.674.586,00	261.240.932,00	(259.566.346,00)
024.07	DITJEN FARMALKES	71.335.000,00	82.278.978,00	(10.943.978,00)
024.12	BADAN PPSDM KES	517.719.753,00	302.433.287,00	215.286.466,00
Total		1.399.069.596,00	1.827.265.090,00	(428.195.494,00)

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satker disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 43
Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker

(dalam rupiah)

No	Es I	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	024.01	260012	DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU	23.012.000,00
2	024.03	219011	DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU	111.835.300,00
3	024.03	320317	DINAS KESEHATAN DHS (ADB) KAB. NATUNA	11.282.635,00
4	024.03	350029	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	19.900.000,00
5	024.04	069002	DINAS KESEHATAN PROVINSI ACEH	32.892.322,00
6	024.04	339033	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT	3.900.000,00
7	024.04	465791	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN	11.160.000,00
8	024.04	538815	RUMAH SAKIT UMUM MANADO	594.358.000,00
9	024.05	513096	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BENGKULU	1.674.586,00
10	024.07	289003	DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA	71.335.000,00
11	024.12	249011	DINKES PROV NTT	173.688.000,00
12	024.12	259006	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	27.613.200,00
13	024.12	269018	DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU	71.132.703,00
14	024.12	632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	196.478.000,00
15	024.12	637571	POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	48.807.850,00
Total				1.399.069.596,00

*Kas di
Bendahara
Penerimaan*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp616.914.118,00 dan Rp679.520.034,00 yang merupakan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNBK. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon 1

(dalam rupiah)

No	KODE ES	NAMA UNIT	31 DES 2016	31 DES 2015	Kenaikan (Penurunan)
1	024.01	SETJEN	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	024.04	DITJEN YANKES	358.904.239,00	584.119.019,00	(225.214.780,00)
3	024.05	DITJEN P2P	112.850.000,00	60.575.000,00	52.275.000,00
4	024.11	BADAN LITBANGKES	121.500,00	16.015,00	105.485,00
5	024.12	BADAN PPSDM KES	135.038.379,00	34.810.000,00	100.228.379,00
Total			616.914.118,00	679.520.034,00	(62.605.916,00)

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker

(dalam rupiah)

No	Es I	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	024.01	465930	BIRO UMUM	10.000.000,00
2	024.04	325155	RSUP RATATOTOK BUYAT	185.988.450,00
3	024.04	552687	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA	32.465.000,00
4	024.04	552713	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA	50.225.789,00
5	024.04	621949	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN	4.695.000,00
6	024.04	621953	BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR	85.530.000,00
7	024.05	415969	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PROBOLINGGO	97.905.000,00
8	024.05	416094	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALEMBANG	5.420.000,00
9	024.05	416139	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MANADO	9.525.000,00
10	024.11	416160	PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN	121.500,00
11	024.12	632160	POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	23.379,00
12	024.12	632270	POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	9.000.000,00
13	024.12	648500	PUSTANSERDIK	126.015.000,00
Total				616.914.118,00

*Kas Lainnya dan
Setara Kas*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp484.358.461.194,00 dan Rp509.571.905.312,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan setara kas pada masing-masing eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Kas lainnya dan Setara Kas per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	31.036.440.872,00	10.822.178.335,00	20.214.262.537,00
024.03	DITJEN KESMAS	15.895.774.052,00	22.869.495.439,00	(6.973.721.387,00)
024.04	DITJEN YANKES	17.170.067.881,00	20.253.854.531,00	(3.083.786.650,00)
024.05	DITJEN P2P	409.843.076.117,00	393.890.608.580,00	15.952.467.537,00
024.07	DITJEN FARMALKES	8.625.706.300,00	59.680.633.868,00	(51.054.927.568,00)
024.11	BADAN LITBANGKES	1.293.261.742,00	1.708.048.962,00	(414.787.220,00)
024.12	BADAN PPSDM KES	494.134.230,00	347.085.597,00	147.048.633,00
	Total	484.358.461.194,00	509.571.905.312,00	(25.213.444.118,00)

Kas pada BLU

C.4 Kas pada BLU

Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.350.139.199.167,00 dan Rp2.469.954.947.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Kas pada BLU TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Kas dan Bank – BLU	1.851.916.451.619,00	2.036.493.634.107,00
2	Kas dan Bank BLU belum disahkan	44.637.592,00	-
3	Surat Berharga – BLU	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4	Setara kas Lainnya - BLU	488.178.109.956,00	428.461.313.751,00
	Total	2.350.139.199.167,00	2.469.954.947.858,00

Rincian Kas pada BLU pada eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 48
Kas pada BLU per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.04	DITJEN YANKES	2.105.535.168.973,00	2.287.177.575.737,00	(181.642.406.764,00)
024.12	BPPSDM KES	244.604.030.194,00	182.777.372.121,00	61.826.658.073,00
	Total	2.350.139.199.167,00	2.469.954.947.858,00	(119.815.748.691,00)

Rincian Kas pada BLU per satker pada lampiran 1.

Investasi Jangka Pendek BLU

C.5 Investasi Jangka Pendek pada BLU

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp283.078.842.932,00 dan Rp232.605.000.000,00, merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU, disajikan sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Investasi Jangka Pendek BLU TA 2016 dan 2015
 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Deposito – BLU	248.663.842.932,00	232.605.000.000,00
2	Investasi Lainnya - BLU	34.415.000.000,00	-
Jumlah		283.078.842.932,00	232.605.000.000,00

Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU pada eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 50
Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon 1
 (dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.04	DITJEN YANKES	218.715.000.000,00	176.500.000.000,00	42.215.000.000,00
024.12	BPPSDM KES	64.363.842.932,00	56.105.000.000,00	8.258.842.932,00
Total		283.078.842.932,00	232.605.000.000,00	50.473.842.932,00

Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU per satker pada lampiran 2.

Belanja Dibayar di Muka

C.6 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp114.879.203.713,00 dan Rp21.766.791.441,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015
 (dalam rupiah)

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Belanja Pegawai	103.477.563,00	-
2	Belanja Barang	113.169.477.150,00	20.796.791.441,00
3	Belanja Modal	970.000.000,00	970.000.000,00
4	Belanja Bansos	636.249.000,00	-
Jumlah		114.879.203.713,00	21.766.791.441,00

Rincian Belanja Dibayar di Muka berdasarkan Eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 52
Belanja Dibayar Dimuka per Eselon 1
 (dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	22.136.249.000,00	19.748.400.000,00	2.387.849.000,00
024.03	DITJEN KESMAS	735.696.666,00	240.286.662,00	495.410.004,00
024.04	DITJEN YANKES	1.394.973.864,00	1.497.296.628,00	(102.322.764,00)
024.05	DITJEN P2P	90.577.150.850,00	160.391.484,00	90.416.759.366,00
024.12	BPPSDM KES	35.133.333,00	120.416.667,00	(85.283.334,00)
Total		114.879.203.713,00	21.766.791.441,00	93.112.412.272,00

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per satker pada lampiran 3.

*Uang Muka
Belanja***C.7 Uang Muka Belanja (Prepayment)**

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp949.749.028,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka Belanja tersebut terdapat pada Ditjen Pelayanan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Uang Muka Belanja TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Uang Muka Belanja Barang	563.028,00	-
2	Uang Muka Belanja Modal	949.186.000,00	-
Jumlah		949.749.028,00	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima***C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp1.723.122.231,00 dan Rp6.770.401.520,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 54
Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.04	DITJEN YANKES	77.671.231,00	5.905.502.520,00	(5.827.831.289,00)
024.05	DITJEN P2P	1.645.451.000,00	864.899.000,00	780.552.000,00
Total		1.723.122.231,00	6.770.401.520,00	(5.047.279.289,00)

*Piutang Bukan
Pajak***C.9 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp28.597.016.130,00 dan Rp54.076.509.981,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBPN pada Kementerian Kesehatan antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2016 dan TA 2015

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Piutang PNBPN	19.429.938.308,00	27.982.851.459,00
2	Piutang Lainnya	9.167.077.822,00	26.093.658.522,00
Jumlah		28.597.016.130,00	54.076.509.981,00

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 56
Piutang Bukan Pajak per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	164.957.216,00	165.300.000,00	(342.784,00)
024.03	DITJEN KESMAS	36.896.000,00	-	36.896.000,00
024.04	DITJEN YANKES	18.275.896.384,00	41.343.478.380,00	(23.067.581.996,00)
024.05	DITJEN P2P	2.615.179.411,00	1.248.961.226,00	1.366.218.185,00
024.07	DITJEN FARMALKES	4.757.416.972,00	10.123.542.000,00	(5.366.125.028,00)
024.11	BADAN LITBANGKES	212.912.600,00	85.147.750,00	127.764.850,00
024.12	BADAN PPSDM KES	2.533.757.547,00	1.110.080.625,00	1.423.676.922,00
Total		28.597.016.130,00	54.076.509.981,00	(25.479.493.851,00)

*Penyisihan
Piutang Bukan
Pajak*

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar (Rp1.712.825.512,00) dan (Rp3.801.981.284,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
TA 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Penyisihan Piutang tidak tertagih - Piutang PNB	(1.597.089.475,00)	(3.696.431.170,00)
2	Penyisihan Piutang tidak tertagih - Piutang Lainnya	(115.736.037,00)	(105.550.114,00)
Jumlah		(1.712.825.512,00)	(3.801.981.284,00)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Bukan Pajak per eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 58
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	(823.514,00)	(826.500,00)	2.986,00
024.03	DITJEN KESMAS	(184.480,00)		(184.480,00)
024.04	DITJEN YANKES	(1.468.255.859,00)	(3.442.848.761,00)	1.974.592.902,00
024.05	DITJEN P2P	(206.041.322,00)	(301.523.271,00)	95.481.949,00
024.07	DITJEN FARMALKES	(23.787.085,00)	(50.617.710,00)	26.830.625,00
024.11	BADAN LITBANGKES	(1.064.563,00)	(424.739,00)	(639.824,00)
024.12	BADAN PPSDM KES	(12.668.689,00)	(5.740.303,00)	(6.928.386,00)
Total		(1.712.825.512,00)	(3.801.981.284,00)	2.089.155.772,00

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR*

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp629.935.089,00 dan Rp168.686.744,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bagian Lancar TP	24.000.000,00	52.960.000,00
2	Bagian Lancar TGR	605.935.089,00	115.726.744,00
Jumlah		629.935.089,00	168.686.744,00

Rincian Bagian Lancar TP/TGR untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 60
Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	394.281.089,00	18.000.000,00	376.281.089,00
024.03	DITJEN KESMAS	120.000.000,00	-	120.000.000,00
024.04	DITJEN YANKES	12.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)
024.05	DITJEN P2P	47.500.000,00	90.855.560,00	(43.355.560,00)
024.07	DITJEN FARMALKES	28.728.000,00		28.728.000,00
024.12	BADAN PPSDM KES	27.426.000,00	41.831.184,00	(14.405.184,00)
Total		629.935.089,00	168.686.744,00	461.248.345,00

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR

*Penyisihan
Piutang - Bagian
Lancar Tagihan
TP/TGR*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar (Rp50.412.175,00) dan (Rp2.294.433,00).

Tabel 61
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR
TA 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(180.000,00)	(2.145.278,00)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(50.232.175,00)	(149.155,00)
Jumlah		(50.412.175,00)	(2.294.433,00)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak tertagih TP/TGR untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 62
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Naik/(Turun)
024.01	SETJEN	(1.971.405,00)	(90.000,00)	(1.881.405,00)
024.03	DITJEN KESMAS	(600.000,00)		(600.000,00)
024.04	DITJEN YANKES	(60.000,00)	(90.000,00)	30.000,00
024.05	DITJEN P2P	(47.500.000,00)	(1.905.278,00)	(45.594.722,00)
024.07	DITJEN FARMALKES	(143.640,00)		(143.640,00)
024.12	BADAN PPSDM KES	(137.130,00)	(209.155,00)	72.025,00
Total		(50.412.175,00)	(2.294.433,00)	(48.117.742,00)

*Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU*

C.13 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang Kegiatan Operasional BLU merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.009.415.810.944,00 dan Rp1.119.369.981.747,00. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	2.008.785.546.081,00	1.119.197.740.472,00
2	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	442.953.333,00	104.435.169,00
3	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	187.311.530,00	67.806.106,00
Jumlah		2.009.415.810.944,00	1.119.369.981.747,00

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.04	DITJEN YANKES	2.008.920.357.611,00	1.119.265.546.578,00	889.654.811.033,00
024.12	BADAN PPSDM KES	495.453.333,00	104.435.169,00	391.018.164,00
Total		2.009.415.810.944,00	1.119.369.981.747,00	890.045.829.197,00

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per satker pada lampiran 4.

Berdasarkan tabel di atas, terkait dengan piutang Ditjen Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2016 senilai Rp2.008.920.357.611,00 adalah sebagai berikut:

- Piutang Jaminan perorangan atau umum sebesar Rp270.466.968.096,00;
- Piutang jaminan Asuransi atau Perusahaan sebesar Rp126.443.272.393,00;
- Piutang BPJS sebesar Rp1.473.971.135.815,00; dan
- Piutang Jaminan Pemerintah Daerah (Jamkesda) sebesar Rp138.038.981.307,00;

Piutang Jamkesda merupakan piutang pemerintah daerah atas pelayanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi penduduk yang di jamin oleh Pemerintah Daerah. Piutang Jamkesda antara lain terdapat pada RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang sebesar Rp66.062.014.205,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp64.211.985.909,00 merupakan hutang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada RSUP Dr Mohammad Hoesin berdasarkan Surat Pernyataan Posisi Hutang Jamsoskes Sumsel Semesta Pemprov Sumatera Selatan Tahun 2016 dari Kepala BPKAD Pemprov Sumsel tanggal 11 April 2017.

Dari total piutang Jamkesda sebesar Rp138.038.981.307,00 tersebut, diantaranya sebesar Rp46.975.426.223,00 merupakan piutang macet.

*Penyisihan
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas piutang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp359.456.896.438,00) dan (Rp292.387.905.301,00).

Tabel 65
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(359.405.979.170,00)	(292.379.473.554,00)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(2.214.767,00)	(522.176,00)
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(48.702.501,00)	(7.909.571,00)
Jumlah		(359.456.896.438,00)	(292.387.905.301,00)

Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 66
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.04	DITJEN YANKES	(359.454.419.171,00)	(292.387.383.125,00)	(67.067.036.046,00)
024.12	BADAN PPSDM KES	(2.477.267,00)	(522.176,00)	(1.955.091,00)
Total		(359.456.896.438,00)	(292.387.905.301,00)	(67.068.991.137,00)

*Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional
BLU*

C.15 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.092.738.621,00 dan Rp2.622.480.125,00. Saldo Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdapat pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Piutang Sewa Tanah – BLU	-	-
2	Piutang Sewa Gedung – BLU	784.274.602,00	294.965.137,00
3	Piutang Sewa Ruangan – BLU	629.876.680,00	939.043.597,00
4	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	2.678.587.339,00	1.388.471.391,00
Jumlah		4.092.738.621,00	2.622.480.125,00

*Penyisihan
Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional
BLU*

C.16 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Non Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp694.128.343,00) dan (Rp435.177.182,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih tersebut terdapat pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Tabel 68
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Penyisihan Piutang Sewa Tanah - BLU		-
2	Penyisihan Piutang Sewa Gedung - BLU	(299.627.660,00)	(98.247.674,00)
3	Penyisihan Piutang Sewa Ruangan - BLU	(238.060.911,00)	(227.624.576,00)
4	Penyisihan Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	(156.439.772,00)	(109.304.932,00)
Jumlah		(694.128.343,00)	(435.177.182,00)

Persediaan

C.17 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp2.081.621.562.988,00 dan Rp944.864.695.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Persediaan TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian Persediaan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Barang Konsumsi	63.422.892.333,00	140.571.918.171,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	1.928.347.786,00	2.084.244.830,00
3	Suku Cadang	16.356.106.539,00	22.510.801.815,00
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	9.970.600,00	28.327.000,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	2.740.878,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	768.144.967.866,00	8.777.071.798,00
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	199.780.000,00
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.233.580.629,00	-
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	151.277.167,00	248.011.691,00
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	528.665.895.086,00	52.931.038.906,00
11	Bahan Baku	55.443.083.969,00	90.393.746.206,00
12	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	19.079.868.279,00	17.268.602.353,00
13	Persediaan Lainnya	627.185.572.734,00	609.848.411.852,00
Total		2.081.621.562.988,00	944.864.695.500,00

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 70
Persediaan per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.01	SETJEN	24.847.722.969,00	27.843.106.131,00	(2.995.383.162,00)
024.02	ITJEN	51.005.098,00	128.950.290,00	(77.945.192,00)
024.03	DITJEN KESMAS	123.164.787.729,00	126.271.157.090,00	(3.106.369.361,00)
024.04	DITJEN YANKES	158.222.859.035,00	10.853.790.726,00	147.369.068.309,00
024.05	DITJEN P2P	1.568.930.025.369,00	676.976.591.045,00	891.953.434.324,00
024.07	DITJEN FARMALKES	184.308.230.398,00	60.611.517.640,00	123.696.712.758,00
024.11	BADAN LITBANGKES	5.020.566.437,00	25.200.308.757,00	(20.179.742.320,00)
024.12	BADAN PPSDM KES	17.076.365.953,00	16.979.273.821,00	97.092.132,00
Total		2.081.621.562.988,00	944.864.695.500,00	1.136.756.867.488,00

Rincian Persediaan per satker pada lampiran 5.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Selain itu, pada Kementerian Kesehatan terdapat barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang yang tidak disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2016, terdiri dari persediaan rusak sebesar Rp3.728.061.038,00 dan persediaan usang sebesar Rp25.260.046.527,00. Rincian Persediaan rusak dan usang per satker pada lampiran 6.

Persediaan BLU

C.18 Persediaan BLU

Persediaan pada Satker BLU berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp811.944.539.615,00 dan Rp785.408.112.549,00.

Rincian Persediaan BLU berdasarkan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Persediaan BLU per Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode Es	Nama Unit	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
024.04	DITJEN YANKES	799.358.461.102,00	770.980.673.901,00	28.377.787.201,00
024.12	BADAN PPSDM KES	12.586.078.513,00	14.427.438.648,00	(1.841.360.135,00)
Total		811.944.539.615,00	785.408.112.549,00	26.536.427.066,00

Rincian Persediaan BLU per satker pada lampiran 7.

Selain menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan Akrual yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, Rumah Sakit BLU menggunakan aplikasi persediaan internal dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Rumah Sakit BLU pada Tahun 2016 mencoba melakukan *bridging* aplikasi, namun masih terdapat kendala, antara lain: penginputan persediaan masih belum semuanya menggunakan satuan terkecil, dan terdapat beberapa transaksi yang tidak tertarik pada saat *upload* data ke Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan Akrual.

Pada tahun 2016, terdapat 3 rumah sakit BLU yang sudah berhasil melakukan *bridging* yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;
2. Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito;
3. Rumah RSAB Harapan Kita.

Selain ke tiga rumah sakit tersebut, proses *bridging* masih mengalami kendala sehingga masih dilakukan pencatatan secara gelondongan, antara lain terjadi pada:

- a) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo;
- b) RSUP Fatmawati;
- c) RSUP Persahabatan;
- d) RSKO Jakarta;
- e) RSUP Dr. Kariadi;
- f) RSUP dr. Soeradji T;
- g) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat;
- h) RSUP H. Adam Malik;
- i) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- j) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Dari total Persediaan Kementerian Kesehatan tahun 2016, diketahui terdapat perbedaan nilai Persediaan SAIBA dengan SIMAK-BMN, dimana nilai Persediaan pada SAIBA lebih rendah sebesar Rp184.017.249.780,00. Perbedaan tersebut disebabkan barang persediaan yang diserahkan ke pemerintah daerah telah dikeluarkan dari aplikasi SAIBA dan tetap disajikan di SIMAK-BMN (Rincian satker yang persediannya berbeda antara nilai SAIBA dan SIMAK BMN terdapat pada lampiran 8).

*Aset Tetap***ASET TETAP**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp39.769.461.961.778,00 dan Rp38.772.063.438.275,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagai berikut :

Tabel 72
Aset Tetap (BMN) Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1311	Tanah	3.815.223.275.869,00	3.086.412.519.684,00	23,61
1313	Tanah BLU	11.854.080.738.081,00	11.806.158.640.149,00	0,41
1321	Peralatan dan Mesin	17.307.412.435.510,00	16.990.046.508.419,00	1,87
1323	Peralatan dan Mesin BLU	11.878.424.542.927,00	9.767.986.555.928,00	21,61
1331	Gedung dan Bangunan	5.253.077.149.711,00	4.920.668.720.474,00	6,76
1333	Gedung dan Bangunan BLU	7.802.461.537.570,00	6.834.920.640.500,00	14,16
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.359.729.434,00	164.428.425.942,00	7,86
1343	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	438.244.547.193,00	412.440.889.251,00	6,26
1351	Aset Tetap Lainnya	164.392.448.316,00	160.444.894.114,00	2,46
1352	Aset Tetap Lainnya BLU	80.909.518.463,00	79.103.782.981,00	2,28
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.802.252.509.888,00	1.740.740.054.866,00	3,53
1362	Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	1.685.746.111.723,00	1.394.472.052.722,00	20,89
	Akumulasi Penyusutan	(22.490.122.582.907,00)	(18.585.760.246.755,00)	21,01
Jumlah Aset Tetap		39.769.461.961.778,00	38.772.063.438.275,00	2,57

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp997.398.523.503,00 atau meningkat sebesar 2,57% dengan peningkatan terbesar pada akun :

- Tanah, meningkat sebesar Rp728.810.756.185,00;
- Peralatan dan Mesin BLU, meningkat sebesar Rp2.110.437.986.999,00;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU, meningkat sebesar Rp291.274.059.001,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

*Tanah***C.19 Tanah**

Tanah yang dimiliki Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.815.223.275.869,00 dan Rp3.086.412.519.684,00.

*Tanah BLU***C.20 Tanah BLU**

Tanah BLU yang dimiliki Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.854.080.738.081,00 dan Rp11.806.158.640.149,00.

Mutasi total Aset Tetap Tanah Kementerian Kesehatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 73
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		14.892.571.159.833,00
Saldo Awal SAIBA		14.892.571.159.833,00
Selisih		-
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	10.287.280.682,00
101	Pembelian	56.524.352.900,00
102	Transfer Masuk	287.695.674.944,00
103	Hibah (Masuk)	54.924.698.500,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	25.485.882.758,00
107	Reklasifikasi Masuk	7.321.307.229,00
112	Perolehan Lainnya	42.672.468.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset	3.311.701.200,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	478.288.522.930,00
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	588.643.559.999,00
208	Pengembangan Melalui KDP	1.888.395.148,00
	TOTAL	1.557.043.844.290,00
Pengurangan		
302	Transfer Keluar	(287.612.034.944,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(7.499.907.229,00)
305	Koreksi Pencatatan	(485.199.048.000,00)
	TOTAL	(780.310.990.173,00)
Saldo Akhir SAIBA		15.669.304.013.950,00
Saldo Akhir SIMAK		15.669.304.013.950,00
Selisih		-

*Peralatan dan
Mesin*

C.21 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp17.307.412.435.510,00 dan Rp16.990.046.508.419,00

*Peralatan dan
Mesin BLU*

C.22 Peralatan dan Mesin BLU

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.878.424.542.927,00 dan Rp9.767.986.555.928,00.

Mutasi total Peralatan dan Mesin Kementerian Kesehatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 74
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		26.906.165.742.447,00
Saldo Awal SAIBA		26.758.033.064.347,00
Selisih		148.132.678.100,00
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	26.865.054.673,00
101	Pembelian	2.198.233.843.582,00
102	Transfer Masuk	341.754.844.725,00
103	Hibah (Masuk)	43.741.772.087,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	624.809.947.295,00
107	Reklasifikasi Masuk	469.378.855.373,00
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	80.766.386.355,00
202	Pengembangan Nilai Aset	6.594.288.934,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	2.519.340.552,00
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	29.447.000,00
208	Pengembangan Melalui KDP	6.528.111.500,00
209	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	298.862.461.130,00
	TOTAL	4.100.084.353.206,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(69.935.526.866,00)
301	Penghapusan	(3.790.868.521,00)
302	Transfer Keluar	(243.392.968.399,00)
303	Hibah (Keluar)	(627.406.563.464,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(432.126.242.765,00)
305	Koreksi Pencatatan	(4.978.099.931,00)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(411.020.750,00)
308	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(199.830.500,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(438.175.930.020,00)
	TOTAL	(1.820.417.051.216,00)
Saldo Akhir Saiba		29.185.836.978.437,00
Saldo Akhir SIMAK		29.185.833.044.437,00
Selisih		3.934.000,00

Selisih sebesar Rp3.934.000,00 terdapat pada satuan kerja Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat yang disebabkan karena likuidasi.

*Gedung dan
Bangunan*

C.23 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp5.253.077.149.711,00 dan Rp4.920.668.720.474,00.

*Gedung dan
Bangunan BLU*

C.24 Gedung dan Bangunan BLU

Gedung dan bangunan BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp7.802.461.537.570,00 dan Rp6.834.920.640.500,00.

Mutasi total transaksi Gedung dan Bangunan Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 75
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		11.755.598.327.974,00
Saldo Awal SAIBA		11.755.589.360.974,00
Selisih		8.967.000,00
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	24.775.102.578,00
101	Pembelian	5.076.164.099,00
102	Transfer Masuk	39.612.375.721,00
103	Hibah (Masuk)	3.998.384.600,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	970.781.743.728,00
107	Reklasifikasi Masuk	361.142.320.305,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.120.023.744,00
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	10.857.135.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset	116.542.057.803,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	4.511.088.253,00
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	2.803.730.234,00
208	Pengembangan Melalui KDP	197.897.355.221,00
209	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	81.594.824.979,00
	TOTAL	1.821.712.306.265,00
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(13.817.709.185,00)
301	Penghapusan	(281.013.700,00)
302	Transfer Keluar	(39.579.286.721,00)
303	Hibah (Keluar)	(82.672.231.979,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(338.276.976.192,00)
305	Koreksi Pencatatan	(4.085.449.000,00)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(1.400.550.002,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(41.658.730.179,00)
	TOTAL	(521.771.946.958,00)
Saldo Akhir SAIBA		13.055.538.687.281,00
Saldo Akhir SIMAK		13.055.538.687.281,00
Selisih		-

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp177.359.729.434,00 dan Rp164.428.425.942,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp438.244.547.193,00 dan Rp412.440.889.251,00

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 76
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		576.869.315.193,00
Saldo Awal SAIBA		576.869.315.193,00
Selisih		-
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	1.786.914.225,00
101	Pembelian	15.107.667.661,00
102	Transfer Masuk	99.556.859.558,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	18.296.363.532,00
107	Reklasifikasi Masuk	10.900.853.957,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	579.860.350,00
202	Pengembangan Nilai Aset	2.945.713.358,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	524.320.000,00
208	Pengembangan Melalui KDP	6.311.165.699,00
209	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	2.063.400.000,00
	TOTAL	158.073.118.340,00
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(1.119.584.237,00)
301	Penghapusan	(55.613.750,00)
302	Transfer Keluar	(3.932.512.657,00)
303	Hibah (Keluar)	(4.128.834.400,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(12.484.219.211,00)
305	Koreksi Pencatatan	(55.752.500,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(97.561.640.151,00)
	TOTAL	(119.338.156.906,00)
Saldo Akhir Saiba		615.604.276.627,00
Saldo Akhir SIMAK		615.604.276.627,00
Selisih		-

*Aset Tetap
Lainnya*

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp164.392.448.316,00 dan Rp160.444.894.114,00.

*Aset Tetap
Lainnya BLU*

C.28 Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya BLU merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp80.909.518.463,00 dan Rp79.103.782.981,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya Kementerian Kesehatan tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 77
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		239.548.677.095,00
Saldo Awal SAIBA		239.548.677.095,00
Selisih		-
Penambahan		
101	Pembelian	7.393.855.989,00
102	Transfer Masuk	2.073.958.255,00
103	Hibah (Masuk)	11.151.500,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.757.949.250,00
107	Reklasifikasi Masuk	2.970.475.320,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	325.636.000,00
209	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	4.558.426.974,00
	TOTAL	20.091.453.288,00
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(355.296.640,00)
301	Penghapusan	(393.600.297,00)
302	Transfer Keluar	(4.886.172.489,00)
303	Hibah (Keluar)	(6.541.656.974,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(1.236.620.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(146.970.000,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(777.847.204,00)
	TOTAL	(14.338.163.604,00)
Saldo Akhir Saiba		245.301.966.779,00
Saldo Akhir SIMAK		245.301.966.779,00
Selisih		-

KDP**C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.802.252.509.888,00 dan Rp1.740.740.054.866,00.

KDP BLU**C.30 Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU**

Saldo KDP BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.685.746.111.723,00 dan Rp1.394.472.052.722,00.

Total nilai KDP dan KDP BLU Kementerian Kesehatan tahun 2016 adalah Rp3.487.998.621.611,00, dengan rincian per eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 78
Jumlah KDP per Eselon 1 Tahun 2016
(dalam rupiah)

No	Kode Es	ESELON I	31 Desember 2016
1	024.01	SETJEN	830.828.400,00
2	024.03	DITJEN KESMAS	1.108.515.579,00
3	024.04	DITJEN YANKES	2.362.441.000.037,00
4	024.05	DITJEN P2P	817.566.357.897,00
5	024.11	BADAN LITBANGKES	7.957.613.700,00
6	024.12	BADAN PPSDM KES	298.094.305.998,00
		JUMLAH	3.487.998.621.611,00

Rincian KDP per satker dapat dilihat pada lampiran 9.

Mutasi nilai KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 79
Mutasi Penambahan dan Pengurangan KDP

(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		3.135.203.140.588,00
Saldo Awal SAIBA		3.135.212.107.588,00
Selisih		(8.967.000,00)
Penambahan		
501	Saldo Awal KDP	13.204.331.031,00
502	Perolehan/Penambahan KDP	226.209.111.630,00
503	Pengembangan KDP	2.066.710.424.614,00
	TOTAL	2.306.123.867.275,00
Pengurangan		
504	Koreksi Nilai KDP	(17.255.652.085,00)
505	Penghapusan/ Penghentian KDP	(41.663.122.818,00)
509	Hibah Keluar KDP	(31.137.677.218,00)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(1.863.271.934.131,00)
	TOTAL	(1.953.328.386.252,00)
Saldo Akhir Saiba		3.487.998.621.611,00
Saldo Akhir SIMAK		3.487.998.621.611,00
Selisih		-

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*

C.31 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing (Rp22.490.122.582.907,00) dan (Rp18.585.760.246.755,00).

Akumulasi penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016.

Tabel 80
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	29.185.836.978.437,00	(20.023.655.437.189,00)	9.162.181.541.248,00
2	Gedung dan Bangunan	13.055.538.687.281,00	(2.190.714.413.918,00)	10.864.824.273.363,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	615.604.276.627,00	(269.376.044.129,00)	346.228.232.498,00
4	Aset Tetap Lainnya	245.301.966.779,00	(6.376.687.671,00)	238.925.279.108,00
	Akumulasi Penyusutan	43.102.281.909.124,00	(22.490.122.582.907,00)	20.612.159.326.217,00

*Piutang Jangka
Panjang*

Saldo Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp2.254.230.316,00 dan Rp2.708.447.093,00. Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagai berikut:

Tabel 81
Daftar Piutang Jangka Panjang Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1521	Piutang Tagihan TP/TGR	1.813.179.303,00	2.579.144.138,00	(29,70)
1563	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(62.008.956,00)	(92.840.247,00)	(33,21)
	Piutang Tagihan TP/TGR (<i>Netto</i>)	1.751.170.347,00	2.486.303.891,00	(29,57)
1522	Piutang Tagihan TP/TGR BLU	248.013.500,00	223.259.500,00	11,09
1564	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR BLU	(5.206.698,00)	(1.116.298,00)	366,43
	Piutang Tagihan TP/TGR BLU (<i>Netto</i>)	242.806.802,00	222.143.202,00	9,30
1551	Piutang Jangka Panjang lainnya	261.560.972,00	0,00	
1569	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya	(1.307.805,00)	0,00	
	Piutang Jangka Panjang lainnya (<i>Netto</i>)	260.253.167,00	0,00	
	Jumlah Piutang Jangka Panjang	2.254.230.316,00	2.708.447.093,00	(16,77)

Saldo Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp454.216.777,00 atau menurun sebesar 16,77% dengan penurunan terbesar pada akun Piutang Tagihan TP/TGR, menurun sebesar Rp765.964.835,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

*Piutang Tagihan
TP/TGR*

C.32 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp1.813.179.303,00 dan Rp2.579.144.138,00. Tagihan TP adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan TGR adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian lebih lanjut terkait Piutang Tagihan TP/TGR menurut eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 82
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Tahun 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

No	Eselon I	31 Des 2016	31 Des 2015	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	294.331.191,00	235.375.600,00	58.955.591,00
2	DITJEN KESMAS	563.063.900,00	915.235.500,00	(352.171.600,00)
3	DITJEN YANKES	56.200.000,00	69.200.000,00	(13.000.000,00)
4	DITJEN P2P	737.444.791,00	1.095.687.571,00	(358.242.780,00)
5	DITJEN FARMALKES	74.249.000,00	131.705.000,00	(57.456.000,00)
6	BADAN LITBANGKES		-	-
7	BADAN PPSDM KES	87.890.421,00	131.940.467,00	(44.050.046,00)
	Jumlah	1.813.179.303,00	2.579.144.138,00	(765.964.835,00)

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-Tagihan
TP/TGR*

C.33 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah (Rp62.008.956,00) dan (Rp92.840.247,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh

kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan TP/TGR per eselon 1 adalah sebagai berikut.

Tabel 83
Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR Tahun 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

No	Nama Unit	Audited 2016	Audited 2015	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	(1.876.438,00)	(1.176.878,00)	(699.560,00)
2	DITJEN KESMAS	(42.316.820,00)	(4.576.178,00)	(37.740.642,00)
3	DITJEN YANKES	(281.000,00)	(346.000,00)	65.000,00
4	DITJEN P2P	(16.724.001,00)	(85.422.964,00)	68.698.963,00
5	DITJEN FARMALKES	(371.245,00)	(658.525,00)	287.280,00
6	BADAN PPSDM KES	(439.452,00)	(659.702,00)	220.250,00
	Total	(62.008.956,00)	(92.840.247,00)	30.831.291,00

Nilai Tagihan TP/TGR (*Netto*) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp1.751.170.347,00 dan Rp2.486.303.891,00, dengan rincian per eselon 1 sebagai berikut:

Tabel 84
Tagihan TP/TGR (*Netto*) Tahun 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

No	Nama Unit	Audited 2016	Audited 2015	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	292.454.753,00	234.198.722,00	58.256.031,00
2	DITJEN KESMAS	520.747.080,00	910.659.322,00	(389.912.242,00)
3	DITJEN YANKES	55.919.000,00	68.854.000,00	(12.935.000,00)
4	DITJEN P2P	720.720.790,00	1.010.264.607,00	(289.543.817,00)
5	DITJEN FARMALKES	73.877.755,00	131.046.475,00	(57.168.720,00)
6	BADAN PPSDM KES	87.450.969,00	131.280.765,00	(43.829.796,00)
	Total	1.751.170.347,00	2.486.303.891,00	(735.133.544,00)

Piutang Tagihan TP/TGR Rugi BLU

C.34 Piutang Tagihan TP/TGR BLU

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp248.013.500,00 dan Rp223.259.500,00, terdapat pada satker Ditjen Yankes.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR BLU

C.35 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah (Rp5.206.698,00) dan (Rp1.116.298,00).

Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.36 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp261.560.972,00 dan Rp0,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-Piutang
Jangka Panjang
Lainnya*

C.37 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah (Rp1.307.805,00) dan Rp0,00.

Aset Lainnya

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp444.005.592.740,00 dan Rp593.951.544.184,00. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagai berikut:

Tabel 85
Rincian Aset Lainnya Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1621	Aset Tak Berwujud	133.553.232.107,00	116.462.625.878,00	14,67
1622	Aset Tak Berwujud-BLU	79.614.025.902,00	60.701.691.760,00	31,16
1624	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU	776.543.200,00	30.890.200,00	2.413,88
1631	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	7.878.117.509,00	12.195.484.432,00	(35,40)
1661	Aset Lain-lain	1.482.723.182.783,00	1.481.166.810.771,00	0,11
1662	Aset Lain-lain-BLU	234.035.417.779,00	152.039.814.951,00	53,93
	Akumulasi penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(1.494.574.926.540,00)	(1.228.645.773.808,00)	21,64
Jumlah Aset Lainnya		444.005.592.740,00	593.951.544.184,00	(25,25)

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp149.945.951.444,00 atau menurun sebesar 25,25% dengan penurunan terbesar pada akun Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, menurun sebesar Rp4.317.366.923,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

ATB

C.38 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tidak berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp133.553.232.107,00 dan Rp116.462.625.878,00. Rincian ATB sebagai berikut:

Tabel 86
Aset Tak Berwujud TA 2016

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	31 Des 2016	31 Des 2015	%
162121	Hak Cipta	21.828.216.288,00	17.801.056.288,00	22,62
162141	Paten	4.960.100.000,00	4.960.100.000,00	0,00
162151	Software	86.445.704.607,00	66.479.182.080,00	30,03
162161	Lisensi	1.856.579.800,00	1.807.500.000,00	2,72
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	18.462.631.412,00	25.414.787.510,00	(27,35)
Total		133.553.232.107,00	116.462.625.878,00	14,67

ATB BLU

C.39 Aset Tak Berwujud BLU

Nilai perolehan ATB BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp79.614.025.902,00 dan Rp60.701.691.760,00. Rincian ATB BLU sebagai berikut:

Tabel 87
ATB - BLU TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	31 Des 2016	31 Des2015	%
162211	Software-BLU	56.598.855.342,00	31.135.503.749,00	81,78
162221	Hak Cipta BLU	878.938.800,00		
162241	Paten BLU	222.550.000,00	222.550.000,00	0,00
162291	ATB Lainnya-BLU	21.913.681.760,00	29.343.638.011,00	(25,32)
Total		79.614.025.902,00	60.701.691.760,00	31,16

ATB Dalam
Pengerjaan BLU

C.40 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU

Nilai perolehan ATB Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp776.543.200,00 dan Rp30.890.200,00. Saldo ATB Dalam Pengerjaan BLU sebesar Rp776.543.200,00 terdapat pada RSAB Harapan Kita Jakarta sebesar Rp745.653.000,00 dan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung sebesar Rp30.890.200,00.

Total ATB Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 adalah Rp213.943.801.209,00, dengan rincian per eselon 1 sebagai berikut:

Tabel 88
Rincian ATB per Eselon 1 TA 2016

(dalam rupiah)

No.	Eselon I	31 Desember 2016
1	SETJEN	45.023.211.466,00
2	ITJEN	2.426.568.918,00
3	DITJEN KESMAS	16.462.774.930,00
4	DITJEN YANKES	94.816.485.187,00
5	DITJEN P2P	10.601.823.665,00
6	DITJEN FARMALKES	11.199.792.850,00
7	BADAN LITBANGKES	4.077.727.308,00
8	BADAN PPSDM KES	29.335.416.885,00
Jumlah		213.943.801.209,00

Adapun mutasi ATB pada Kementerian Kesehatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 89
Rincian Mutasi ATB TA 2016

(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		177.195.207.838,00
Saldo Awal SAIBA		177.195.207.838,00
Selisih		-
Penambahan		
100	Penambahan Saldo Awal	580.828.500,00
101	Pembelian	30.041.697.555,00
102	Transfer Masuk	23.708.676.033,00
103	Hibah (Masuk)	5.000.000,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	793.967.800,00
107	Reklasifikasi Masuk	9.871.142.600,00
202	Pengembangan Nilai Aset	5.646.948.264,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	203.066.325,00
208	Pengembangan Melalui KDP	806.850.000,00
209	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	15.400.000,00
502	Perolehan/Penambahan KDP	1.188.928.000,00
503	Pengembangan KDP	543.800.000,00
	TOTAL	73.406.305.077,00
Pengurangan		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(682.149.998,00)
301	Penghapusan	(536.117.000,00)
302	Transfer Keluar	(23.708.676.033,00)
303	Hibah (Keluar)	(15.400.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(8.229.294.650,00)
305	Koreksi Pencatatan	(251.246.325,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.247.752.700,00)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(987.075.000,00)
	TOTAL	(36.657.711.706,00)
Saldo Akhir SAIBA		213.943.801.209,00
Saldo Akhir SIMAK		213.943.801.209,00
Selisih		-

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya*

C.41 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp7.878.117.509,00 dan Rp12.195.484.432,00. Saldo Dana yang dibatasi Penggunaannya seluruhnya berasal dari sisa saldo Dana Jamkesmas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 90
Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo		Kenaikan/ Penurunan
	31-Des-16	31-Des-15	
Jamkesmas Rujukan	7.854.175.701,00	10.191.549.955,00	-2.337.374.254,00
Jamkesmas Dasar	23.941.808,00	2.003.934.477,00	-1.979.992.669,00
Total	7.878.117.509,00	12.195.484.432,00	-4.317.366.923,00

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per satker dapat dilihat pada lampiran 10.a dan 10.b.

Aset Lain-Lain

C.42 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.482.723.182.783,00 dan Rp1.481.166.810.771,00. Aset Lain-lain berupa BMN dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

*Aset Lain-Lain
BLU*

C.43 Aset Lain-Lain BLU

Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp234.035.417.779,00 dan Rp152.039.814.951,00. Aset Lain-lain berupa BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Total Aset Lain-lain Kementerian Kesehatan tahun 2016 adalah sebesar Rp1.716.758.600.562,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91
Daftar Aset Lain-lain TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.479.979.667.033,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.743.515.750,00
3	Aset Lain-lain-BLU	5.064.697.546,00
4	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan – BLU	228.969.420.233,00
5	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan – BLU	1.300.000,00
Jumlah		1.716.758.600.562,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 92
Mutasi Aset Lain-Lain TA 2016

(dalam rupiah)

Saldo Awal SIMAK		11.880.011.919.152,00
Saldo Awal SAIBA		1.633.206.625.722,00
Selisih		10.246.805.293.430,00
Penambahan		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	580.421.900.254,00
	TOTAL	580.421.900.254,00
Pengurangan		
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(434.848.359.554,00)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(111.386.138.312,00)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(198.068.450.864,00)
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(348.704.938.234,00)
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(193.406.000,00)
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(12.561.442.870,00)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(19.912.990.433,00)
398	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(420.691.000,00)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihenti	(91.623.521.355,00)
	TOTAL	(1.217.719.938.622,00)
Saldo Akhir Saiba		1.716.758.600.562,00
Saldo Akhir SIMAK		11.242.713.880.784,00
Selisih		(9.525.955.280.222,00)

Selisih SAIBA lebih rendah sebesar Rp9.525.955.280.222,00 disebabkan:

- Terdapat Aset Lain-Lain BLU yang di sita Kejaksaan pada RSUP H. Adam Malik dengan nilai sebesar Rp889.911.051,00 yang merupakan dana GAKIN tahun anggaran 2001/2002 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Oktober 2005 sebagai salah satu barang bukti dalam perkara penyalahgunaan dana GAKIN;
- Terdapat Aset pengadaan satker pusat dan aset satker DK/TP hasil pengadaan di bawah tahun 2011 yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebesar Rp9.526.845.191.273,00 dan telah dikeluarkan dari Neraca SAIBA tetapi masih tercatat dalam SIMAK BMN.

Akumulasi

*Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*

*Kewajiban Jangka
Pendek*

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar (Rp1.494.574.926.540,00) dan (Rp1.228.645.773.808,00).

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.316.606.028.013,00 dan Rp1.060.072.481.404,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagai berikut :

Tabel 93
Kewajiban Jangka Pendek TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	1.189.124.596.465,00	951.355.609.080,00	24,99
2182	Hibah Yang Belum Disahkan	18.094.784.043,00	19.481.326.714,00	(7,12)
2192	Pendapatan Diterima Dimuka	107.974.260.223,00	86.302.384.439,00	25,11
2195	Uang Muka dari KPPN	1.399.069.596,00	1.827.265.090,00	(23,43)
2199	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.317.686,00	1.105.896.081,00	(98,80)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.316.606.028.013,00	1.060.072.481.404,00	24,20

Saldo Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp256.533.546.609,00 atau meningkat sebesar 24,20% dengan peningkatan terbesar pada akun:

- a. Pendapatan Diterima Dimuka, meningkat sebesar Rp21.671.875.784,00;
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga, meningkat sebesar Rp237.768.987.385,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

*Utang Kepada
Pihak Ketiga*

C.45 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.189.124.596.465,00 dan Rp951.355.609.080,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian

Kesehatan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Tabel 94
Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	10.044.078.618,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	69.848.068.972,00
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	11.090.232.404,00
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	1.000.739.705.547,00
5	Utang Usaha BLU	74.255.719.608,00
6	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	8.411.671.136,00
7	Dana Pihak Ketiga	3.459.031.292,00
8	Dana Pihak Ketiga Lainnya – BLU	11.276.088.888,00
Jumlah		1.189.124.596.465,00

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 95
Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Unit	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	SETJEN	2.237.895.000,00	11.521.993.369,00	(80,58)
2	DITJEN KESMAS	400.472.264,00	27.939.079,00	1.333,38
3	DITJEN YANKES	1.177.272.696.949,00	929.089.166.234,00	26,71
4	DITJEN P2P	1.051.620.658,00	2.381.536.609,00	(55,84)
5	DITJEN FARMALKES	64.137.172,00	276.520.660,00	(76,81)
6	BADAN LITBANGKES	477.058.045,00	1.380.543.775,00	(65,44)
7	BADAN PPSDM KES	7.620.716.377,00	6.677.909.354,00	14,12
JUMLAH		1.189.124.596.465,00	951.355.609.080,00	24,99

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per satker terdapat pada lampiran 11.

*Hibah Yang
Belum Disahkan*

C.46 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.094.784.043,00 dan Rp19.481.326.714,00.

Tabel 96
Rincian Hibah yang Belum Disahkan per Eselon 1 TA 2016

(dalam rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2016
1	DITJEN P2P	17.567.278.660,00
2	BADAN LITBANGKES	527.505.383,00
Jumlah		18.094.784.043,00

*Pendapatan
Diterima Dimuka*

C.47 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp107.974.260.223,00 dan Rp86.302.384.439,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 97
Pendapatan Diterima di Muka TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	5.494.375.755,00
2	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	56.260.599.685,00
3	Pendapatan Diterima di Muka BLU	46.219.284.783,00
Jumlah		107.974.260.223,00

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 98
Pendapatan Diterima Di muka TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Eselon I	31 Des 2016	31 Des2015	Kenaikan (Penurunan)
1	SETJEN	2.807.089.145,00	1.929.725.811,00	877.363.334,00
2	DITJEN KESMAS	4.774.500,00	2.955.667,00	1.818.833,00
3	DITJEN YANKES	9.492.025.713,00	9.977.747.125,00	(485.721.412,00)
4	DITJEN P2P	53.182.002,00	40.378.333,00	12.803.669,00
5	DITJEN FARMALKES	8.970.750.000,00	4.896.250.000,00	4.074.500.000,00
6	BADAN LITBANGKES	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)
7	BADAN PPSDM KES	86.646.438.863,00	69.450.327.503,00	17.196.111.360,00
Jumlah		107.974.260.223,00	86.302.384.439,00	21.671.875.784,00

*Uang Muka dari
KPPN*

C.48 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.399.069.596,00 dan Rp1.827.265.090,00, merupakan UP atau TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya*

C.49 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp13.317.686,00 dan Rp1.105.896.081,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada masing-masing eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 99
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

No	Eselon I	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1	DITJEN YANKES	13.317.686,00	1.102.297.571,00	(98,79)
2	DITJEN P2P	-	3.598.510,00	(100,00)
Jumlah		13.317.686,00	1.105.896.081,00	(98,80)

Ekuitas

C.50 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.710.647.659.719,00 dan Rp44.161.709.887.849,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**Pendapatan
PNBP****D.1 PENDAPATAN**

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.330.339.747.254,00 dan Rp9.825.703.886.896,00 atau mengalami kenaikan sebesar 15,31%. Pendapatan PNBP menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 100
Pendapatan PNBP TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	20.931.590.779,00	10.328.205.258,00	102,66
024.02	ITJEN	0,00	2.019.528,00	(100,00)
024.03	DITJEN KESMAS	1.325.761.398,00	2.843.888.127,00	(53,38)
024.04	DITJEN YANKES	10.333.757.007.268,00	8.949.689.320.471,00	15,46
024.05	DITJEN P2P	292.396.437.755,00	229.678.278.702,00	27,31
024.07	DITJEN FARMALKES	27.615.431.974,00	40.518.035.925,00	(31,84)
024.11	BADAN LITBANGKES	4.451.573.936,00	6.555.461.117,00	(32,09)
024.12	BADAN PPSDM KES	649.861.944.144,00	586.088.677.768,00	10,88
Jumlah		11.330.339.747.254,00	9.825.703.886.896,00	15,31

**Beban
Operasional****D.2 BEBAN**

Jumlah Beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp56.277.972.457.580,00 dan Rp48.234.413.622.963,00 dengan rincian jenis beban masing-masing yaitu:

Beban Pegawai**D.2.1 Beban Pegawai**

Beban Pegawai untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.356.791.122.766,00 dan Rp8.856.615.537.140,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 101
Beban Pegawai TA 2016 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2015	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	2.784.012.939.327,00	2.110.769.914.494,00	31,90
024.02	ITJEN	33.096.674.095,00	28.878.031.669,00	14,61
024.03	DITJEN KESMAS	54.316.196.080,00	47.793.336.870,00	13,65
024.04	DITJEN YANKES	5.814.016.611.927,00	5.130.148.636.300,00	13,33
024.05	DITJEN P2P	422.924.695.921,00	386.620.930.206,00	9,39
024.07	DITJEN FARMALKES	28.550.415.361,00	24.363.295.649,00	17,19
024.11	BADAN LITBANGKES	145.106.572.875,00	134.960.629.735,00	7,52
024.12	BADAN PPSDM KES	1.074.767.017.180,00	993.080.762.217,00	8,23
Jumlah		10.356.791.122.766,00	8.856.615.537.140,00	16,94

Beban Persediaan D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.265.156.978.310,00 dan Rp4.043.127.098.410,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102
Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1	Beban Persediaan konsumsi	182.305.532.400,00	191.159.313.631,00	(4,63)
2	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	105.073.100,00	90.998.550,00	15,47
3	Beban Persediaan bahan baku	99.813.135.967,00	296.956.484.853,00	(66,39)
4	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	183.275.116.458,00	25.085.338.215,00	630,61
5	Beban Persediaan Lainnya	351.887.981.062,00	385.889.706.092,00	(8,81)
6	Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan	3.419.965.012.231,00	3.117.464.636.639,00	9,70
7	Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	27.805.127.092,00	26.480.620.430,00	5,00
	Jumlah	4.265.156.978.310,00	4.043.127.098.410,00	5,49

Beban Persediaan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 103
Beban Persediaan TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	30.513.581.937,00	41.047.034.826,00	(25,66)
024.02	ITJEN	1.873.899.451,00	1.534.152.385,00	22,15
024.03	DITJEN KESMAS	88.968.399.970,00	67.480.332.591,00	31,84
024.04	DITJEN YANKES	3.435.863.444.340,00	3.365.930.595.945,00	2,08
024.05	DITJEN P2P	519.608.096.597,00	412.340.939.385,00	26,01
024.07	DITJEN FARMALKES	7.771.221.923,00	37.604.204.806,00	(79,33)
024.11	BADAN LITBANGKES	120.529.992.085,00	57.571.153.400,00	109,36
024.12	BADAN PPSDM KES	60.028.342.007,00	59.618.685.072,00	0,69
	Jumlah	4.265.156.978.310,00	4.043.127.098.410,00	5,49

Beban Barang dan Jasa**D.2.3 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.649.890.539.577,00 dan Rp6.431.868.267.143,00. Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 104
Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	359.288.176.729,00	461.792.219.965,00	(22,20)
024.02	ITJEN	7.433.269.368,00	10.356.994.502,00	(28,23)
024.03	DITJEN KESMAS	345.064.376.259,00	1.440.592.436.986,00	(76,05)
024.04	DITJEN YANKES	2.825.873.929.251,00	2.718.016.792.088,00	3,97
024.05	DITJEN P2P	537.328.127.609,00	500.408.225.671,00	7,38
024.07	DITJEN FARMALKES	69.401.638.489,00	67.872.404.459,00	2,25
024.11	BADAN LITBANGKES	133.288.315.429,00	87.193.741.583,00	52,86
024.12	BADAN PPSDM KES	1.372.212.706.443,00	1.145.635.451.889,00	19,78
Jumlah		5.649.890.539.577,00	6.431.868.267.143	(12,16)

*Beban
Pemeliharaan*

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.036.014.871.240,00 dan Rp896.221.217.913,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 105
Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.359.685.134,00	191.839.551.601,00	(5,46)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.525.318.341,00	5.719.837.988,00	66,53
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.545.462.150,00	143.323.296.084,00	36,44
4	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	733.009.005,00	718.891.795,00	1,96
5	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.145.097.232,00	11.192.544.956,00	(0,42)
6	Beban Pemeliharaan Irigasi	118.560.000,00	59.865.000,00	98,05
7	Beban Pemeliharaan Jaringan	6.042.111.077,00	4.244.924.784,00	42,34
8	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.459.167.340,00	12.759.067.070,00	(88,56)
9	Beban Pemeliharaan	343.037.022.412,00	334.079.729.285,00	2,68
10	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34.009.097.822,00	11.045.090.318,00	207,91
11	Beban Persediaan suku cadang	253.040.340.727,00	181.238.419.032,00	39,62
Jumlah		1.036.014.871.240,00	896.221.217.913,00	15,60

Beban Pemeliharaan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 106
Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	31.277.708.937,00	33.145.794.988,00	(5,64)
024.02	ITJEN	1.692.605.590,00	1.385.482.093,00	22,17
024.03	DITJEN KESMAS	6.287.102.192,00	6.431.639.189,00	(2,25)
024.04	DITJEN YANKES	781.917.722.812,00	591.815.417.104,00	32,12
024.05	DITJEN P2P	67.359.006.012,00	96.714.689.830,00	(30,35)
024.07	DITJEN FARMALKES	1.830.330.000,00	2.499.527.943,00	(26,77)
024.11	BADAN LITBANGKES	19.825.251.017,00	22.150.662.177,00	(10,50)
024.12	BADAN PPSDM KES	125.825.144.680,00	142.078.004.589,00	(11,44)
Jumlah		1.036.014.871.240,00	896.221.217.913,00	15,60

Beban Perjalanan Dinas **D.2.5 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.839.797.760.514,00 dan Rp1.681.137.032.462,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 107
Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan TA 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1	Beban Perjalanan Biasa	942.166.121.797,00	611.509.432.041,00	54,07
2	Beban Perjalanan Tetap	1.013.667.587,00	1.000.775.295,00	1,29
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	137.288.308.134,00	105.485.547.508,00	30,15
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	768.104.122.398,00	434.398.827.243,00	76,82
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	777.638.331.251,00	383.638.027.712,00	102,70
6	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	134.959.640.106,00	64.753.036.344,00	108,42
7	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	269.557.518,00	0,00	0,00
8	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	14.640.291.434,00	12.532.661.081,00	16,82
9	Beban Perjalanan	63.717.720.289,00	67.818.725.238,00	(6,05)
	Jumlah	2.839.797.760.514,00	1.681.137.032.462,00	68,92

Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 108
Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	441.210.360.146,00	328.303.134.818,00	34,39
024.02	ITJEN	48.507.499.379,00	36.539.888.074,00	32,75
024.03	DITJEN KESMAS	514.450.495.838,00	344.534.079.563,00	49,32
024.04	DITJEN YANKES	262.124.578.776,00	152.247.276.163,00	72,17
024.05	DITJEN P2P	739.860.678.157,00	487.082.256.369,00	51,90
024.07	DITJEN FARMALKES	144.975.164.253,00	64.509.278.608,00	124,74
024.11	BADAN LITBANGKES	261.573.668.776,00	110.544.214.458,00	136,62
024.12	BADAN PPSDM KES	427.095.315.189,00	157.376.904.409,00	171,38
	Jumlah	2.839.797.760.514,00	1.681.137.032.462	68,92

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat **D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.964.106.922.061,00 dan Rp2.206.623.078.833,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 109
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan TA 2015
 (dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	51.418.016.696,00	0,00	0,00
2	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	6.165.503.000,00	(100,00)
3	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.726.074.792,00	150.799.551.426,00	(97,53)
4	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	11.000.000,00	(100,00)
5	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	6.107.546,00	12.077.318.992,00	(99,95)
6	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.908.956.723.027,00	2.037.539.505.415,00	42,77
7	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	30.200.000,00	(100,00)
	Jumlah	2.964.106.922.061,00	2.206.623.078.833,00	34,33

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 110
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	261.196.091,00	739.094.166,00	(64,66)
024.02	ITJEN	0,00	0,00	0,00
024.03	DITJEN KESMAS	650.019.105.163,00	296.161.687.658,00	119,48
024.04	DITJEN YANKES	399.791.575,00	5.867.508.146,00	(93,19)
024.05	DITJEN P2P	916.552.458.528,00	622.400.763.092,00	47,26
024.07	DITJEN FARMALKES	1.392.488.383.330,00	1.278.027.004.678,00	8,96
024.11	BADAN LITBANGKES	2.629.396.374,00	2.914.222.153,00	(9,77)
024.12	BADAN PPSDM KES	1.756.591.000,00	512.798.940,00	242,55
	Jumlah	2.964.106.922.061,00	2.206.623.078.833,00	34,33

Beban Bantuan Sosial

D.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.814.347.603.125,00 dan Rp19.884.364.285.200,00 atau naik 24,79% terdapat pada Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.275.703.136.645,00 dan Rp4.207.841.607.113,00.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama

masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 111
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	64.944.130.618,00	70.930.313.708,00	(8,44)
024.02	ITJEN	2.898.364.845,00	2.296.378.459,00	26,21
024.03	DITJEN KESMAS	47.295.077.616,00	35.705.517.444,00	32,46
024.04	DITJEN YANKES	3.579.302.040.782,00	3.477.867.546.537,00	2,92
024.05	DITJEN P2P	189.749.986.654,00	249.146.244.586,00	(23,84)
024.07	DITJEN FARMALKES	7.654.042.240,00	6.738.140.326,00	13,59
024.11	BADAN LITBANGKES	52.006.426.814,00	43.247.446.977,00	20,25
024.12	BADAN PPSDM KES	331.853.067.076,00	321.910.019.076,00	3,09
Jumlah		4.275.703.136.645,00	4.207.841.607.113,00	1,61

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp76.163.523.342,00 dan Rp26.615.498.749,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang yang tidak tertagih atas nilai suatu piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 112
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan TA 2015
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Des 2016	31 Des 2015	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	716.100.467,00	3.413.092.364,00	(79,02)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	59.060.873,00	105.096.125,00	(43,80)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(318.651,00)	(1.178.528,00)	(72,96)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR BLU	324.778,00	-	-
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	75.064.972.917,00	22.997.848.309,00	226,40
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1.322.041,00	(205.200,00)	(744,27)
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	-	(7.000.782,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(34.299.509,00)	6.827.095,00	(602,40)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	201.379.986,00	(25.292.765,00)	(896,20)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruang BLU	10.436.335,00	1.962.148,00	431,88
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	121.863.076,00	98.829.476,00	23,31
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	17.290.199,00	25.612.007,00	(32,49)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	4.083.025,00	(91.500,00)	(4.562,32)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.307.805,00	-	-
Jumlah	76.163.523.342,00	26.615.498.749,00	186,16

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Eselon 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 113
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	2.577.979,00	(1.685.809,00)	(252,92)
024.02	ITJEN	-	-	-
024.03	DITJEN KESMAS	18.675.122,00	4.576.178,00	308,09
024.04	DITJEN YANKES	76.257.130.395,00	25.675.701.091,00	197,00
024.05	DITJEN P2P	(97.274.365,00)	891.837.125,00	(110,91)
024.07	DITJEN FARMALKES	(26.974.265,00)	51.276.235,00	(152,61)
024.11	BADAN LITBANGKES	639.824,00	(15.500,00)	(4.227,90)
024.12	BADAN PPSDM KES	8.748.652,00	(6.190.571,00)	(241,32)
Jumlah		76.163.523.342,00	26.615.498.749,00	186,16

Defisit Kegiatan Operasional

D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas, merupakan selisih kurang dari hasil pendapatan operasional dan beban operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar (Rp44.947.632.710.326,00) dan (Rp38.408.709.736.067,00) adalah sebagai berikut:

Tabel 114
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Jumlah Pendapatan Operasional	11.330.339.747.254,00	9.825.703.886.896,00	15,31
2	Jumlah Beban Operasional	56.277.972.457.580,00	48.234.413.622.963,00	16,68
	Defisit dari Kegiatan Operasional	(44.947.632.710.326,00)	(38.408.709.736.067,00)	17,02

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional menurut Eselon 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 115
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	(28.504.926.684.110,00)	(22.920.761.901.098,00)	24,36
024.02	ITJEN	(95.502.312.728,00)	(80.988.907.654,00)	17,92
024.03	DITJEN KESMAS	(1.705.093.666.842,00)	(2.235.859.718.352,00)	(23,74)
024.04	DITJEN YANKES	(6.441.998.242.590,00)	(6.517.880.152.903,00)	(1,16)
024.05	DITJEN P2P	(3.100.889.337.358,00)	(2.525.927.607.562,00)	22,76
024.07	DITJEN FARMALKES	(1.625.028.789.357,00)	(1.441.147.096.779,00)	12,76
024.11	BADAN LITBANGKES	(730.508.689.258,00)	(452.026.593.866,00)	61,61
024.12	BADAN PPSDM KES	(2.743.684.988.083,00)	(2.234.117.757.853,00)	22,81
Jumlah		(44.947.632.710.326,00)	(38.408.709.736.067)	17,02

KEGIATAN NON OPERASIONAL**Defisit Pelepasan Aset Non Lancar****D.4 DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar (Rp256.093.851.879.00) dan (Rp52.951.893.099) diperoleh dari hasil perhitungan yaitu Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi Beban Atas Pelepasan Aset Non Lancar, yaitu:

Pendapatan pelepasan aset non lancar**D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

Pendapatan pelepasan aset non lancar adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih besar daripada nilai bukunya. Pendapatan pelepasan aset non lancar untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp4.075.760.361,00 dan Rp3.304.485.770,00 dengan rincian selama Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 116
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Des 2016	31 Des 2015	%
1	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	375.820.665,00	19.980.000,00	1.780,98
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	545.874.145,00	171.199.975,00	218,85
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.154.065.551,00	3.113.305.795,00	1,31
Jumlah		4.075.760.361,00	3.304.485.770,00	23,34

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 117
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	65.100.000,00	140.546.000,00	(53,68)
024.02	ITJEN	22.500.000,00	5.600.000,00	301,79
024.03	DITJEN KESMAS	8.800.000,00	37.400.000,00	(76,47)
024.04	DITJEN YANKES	2.153.208.298,00	2.253.019.240,00	(4,43)
024.05	DITJEN P2P	588.867.954,00	505.750.530,00	16,43
024.07	DITJEN FARMALKES	73.399.000,00	20.300.000,00	261,57
024.11	BADAN LITBANGKES	113.392.000,00	97.150.000,00	16,72
024.12	BADAN PPSDM KES	1.050.493.109,00	244.720.000,00	329,26
Jumlah		4.075.760.361,00	3.304.485.770,00	23,34

Beban Pelepasan Aset Non Lancar**D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar**

Beban pelepasan aset non lancar adalah kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih kecil daripada nilai bukunya, yang pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp260.169.612.240,00 dan Rp56.256.378.869,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 118
Beban Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015 menurut Unit Eselon 1
 (dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	105.701.459,00	117.633.058,00	(10,14)
024.02	ITJEN	0,00	0,00	0,00
024.03	DITJEN KESMAS	37.125.806.912,00	6.488.247.638,00	472,20
024.04	DITJEN YANKES	206.817.585.714,00	39.100.378.892,00	428,94
024.05	DITJEN P2P	10.934.686.397,00	1.747.441.844,00	525,75
024.07	DITJEN FARMALKES	875.797.797,00	6.946.413.949,00	(87,39)
024.11	BADAN LITBANGKES	275.909.531,00	775.867.073,00	(64,44)
024.12	BADAN PPSDM KES	4.034.124.430,00	1.080.396.415,00	273,39
Jumlah		260.169.612.240,00	56.256.378.869	362,47

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya*

D.5 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp206.697.694.279,00 dan Rp168.563.575.850,00 diperoleh dari perhitungan yaitu Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dikurangi Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, yaitu:

D.5.1 Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
kegiatan non
operasional
lainnya*

Pendapatan kegiatan non operasional lainnya untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp534.722.242.871,00 dan Rp190.147.787.448,00 merupakan penerimaan-penerimaan dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, seperti penerimaan kembali belanja-belanja dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 119
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015
 (dalam rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	62.015.198,00	244.708.305,00	(74,66)
2	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	831.588.332,00	2.418.919.265,00	(65,62)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.730.858.248,00	4.988.853.028,00	(25,22)
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	102.735.944.361,00	25.159.756.282,00	308,33
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	15.985.654.170,00	3.343.210.175,00	378,15
6	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	134.772.000,00	(100,00)
7	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	2.226.346.146,00	10.071.068.125,00	(77,89)
8	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	14.087.096,00	1.474.997.484,00	(99,04)
9	Pendapatan dari Hibah Yang Belum Disahkan	940.768.185,00	0,00	-
10	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	52.993.374.586,00	142.311.502.784,00	-
11	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	355.201.606.549,00	0,00	-
Jumlah		534.722.242.871,00	190.147.787.448,00	181,21

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 120
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	4.878.049.849,00	3.498.274.959,00	39,44
024.02	ITJEN	29.432.382,00	9.753.622,00	201,76
024.03	DITJEN KESMAS	11.119.491.103,00	4.949.203.745,00	124,67
024.04	DITJEN YANKES	290.503.010.859,00	120.954.331.785,00	140,18
024.05	DITJEN P2P	65.952.238.375,00	9.697.078.611,00	580,12
024.07	DITJEN FARMALKES	96.884.524.840,00	181.105.990,00	53396,04
024.11	BADAN LITBANGKES	4.703.397.991,00	140.834.455,00	3239,66
024.12	BADAN PPSDM KES	60.652.097.472,00	50.717.204.281,00	19,59
Jumlah		534.722.242.871,00	190.147.787.448	181,21

Terdapat kenaikan yang signifikan di Ditjen Farmalkes sebesar 53.396,04%, hal ini terjadi karena adanya Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) yang pada tahun 2015 disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Beban dari kegiatan non operasional lainnya

D.5.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp328.024.548.592,00 dan Rp21.584.211.598,00 merupakan kerugian dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, yang dalam hal ini adalah kerugian dari aset yang telah usang atau rusak. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 121
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	675.819.053,00	252.393.420,00	167,76
024.02	ITJEN	26.101.028,00	0,00	0,00
024.03	DITJEN KESMAS	9.878.502.106,00	0,00	0,00
024.04	DITJEN YANKES	200.931.100.921,00	3.453.107.232,00	5.718,85
024.05	DITJEN P2P	44.104.267.338,00	14.593.848.231,00	202,21
024.07	DITJEN FARMALKES	59.114.794.772,00	3.282.948.715,00	1.700,66
024.11	BADAN LITBANGKES	10.028.978.657,00	1.914.000,00	523.880,08
024.12	BADAN PPSDM KES	3.264.984.717,00	0,00	0,00
Jumlah		328.024.548.592,00	21.584.211.598,00	1.419,74

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

D.6 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas, yang dalam hal ini adalah selisih lebih dari hasil pelepasan aset non lancar dan kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar (Rp49.936.157.600,00) dan Rp115.611.682.751,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 122
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(256.093.851.879,00)	(52.951.893.099,00)	383,63
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	206.697.694.279,00	168.563.575.850,00	22,62
	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(49.396.157.600,00)	115.611.682.751,00	(142,73)

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 123
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	4.161.629.337,00	3.268.794.481,00	27,31
024.02	ITJEN	25.831.354,00	15.353.622,00	68,24
024.03	DITJEN KESMAS	(35.876.017.915,00)	(1.501.643.893,00)	2.289,12
024.04	DITJEN YANKES	(115.092.467.478,00)	80.653.864.901,00	(242,70)
024.05	DITJEN P2P	11.502.152.594,00	(6.138.460.934,00)	(287,38)
024.07	DITJEN FARMALKES	36.967.331.271,00	(10.027.956.674,00)	(468,64)
024.11	BADAN LITBANGKES	(5.488.098.197,00)	(539.796.618,00)	916,70
024.12	BADAN PPSDM KES	54.403.481.434,00	49.881.527.866,00	9,07
	Jumlah	(49.396.157.600,00)	115.611.682.751,00	(142,73)

Surplus/Defisit LO

D.7 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, dan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar (Rp44.997.028.867.926,00) dan (Rp38.293.098.053.316,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
1	Defisit dari Kegiatan Operasional	(44.947.632.710.326,00)	(38.408.709.736.067,00)	17,02
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(49.396.157.600,00)	115.611.682.751,00	(142,73)
	Defisit LO	(44.997.028.867.926,00)	(38.293.098.053.316,00)	17,51

Surplus/Defisit Laporan Operasional menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 125
Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	SETJEN	(28.500.765.054.773,00)	(22.917.493.106.617,00)	24,36
024.02	ITJEN	(95.476.481.374,00)	(80.973.554.032,00)	17,91
024.03	DITJEN KESMAS	(1.740.969.684.757,00)	(2.237.361.362.245,00)	(22,19)
024.04	DITJEN YANKES	(6.557.090.710.068,00)	(6.437.226.288.002,00)	1,86
024.05	DITJEN P2P	(3.089.387.184.764,00)	(2.532.066.068.496,00)	22,01
024.07	DITJEN FARMALKES	(1.588.061.458.086,00)	(1.451.175.053.453,00)	9,43
024.11	BADAN LITBANGKES	(735.996.787.455,00)	(452.566.390.484,00)	62,63
024.12	BADAN PPSDM KES	(2.689.281.506.649,00)	(2.184.236.229.987,00)	23,12
Jumlah		(44.997.028.867.926,00)	(38.293.098.053.316,00)	17,51

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp44.161.709.887.849 dan Rp42.295.954.922.184,00.

Surplus/Defisit

LO

E.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar (Rp44.997.028.867.926,00) dan (Rp38.293.098.053.316,00). Defisit LO merupakan penjumlahan dari Defisit Kegiatan Operasional dan Defisit Kegiatan Non Operasional.

Tabel 126
Surplus/Defisit TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	Setjen	(28.500.765.054.773)	(22.917.493.106.617)	24,36
024.02	Itjen	(95.476.481.374)	(80.973.554.032)	17,91
024.03	Ditjen Kesmas	(1.740.969.684.757)	(2.237.361.362.245)	(22,19)
024.04	Ditjen Yankes	(6.557.090.710.068)	(6.437.226.288.002)	1,86
024.05	Ditjen PP dan PL	(3.089.387.184.764)	(2.532.066.068.496)	22,01
024.07	Ditjen Farmalkes	(1.588.061.458.086)	(1.451.175.053.453)	9,43
024.11	Badan Litbangkes	(735.996.787.455)	(452.566.390.484)	62,63
024.12	Badan PPSDM Kes	(2.689.281.506.649)	(2.184.236.229.987)	23,12
Jumlah		(44.997.028.867.926)	(38.293.098.053.316)	17,51

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp796.698.134.526,00 dan Rp1.117.563.694.210,00. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Lain-Lain.

Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp71.436.664.304,00. Saldo Penyesuaian Nilai Aset tahun 2015 merupakan penyesuaian nilai persediaan disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan Harga Perolehan Terakhir. Selain itu juga merupakan pencatatan koreksi atas kesalahan persediaan yang terjadi dan diperbaiki pada tahun anggaran berjalan serta pembulatan akun-akun belum diregister.

Tidak ada penyesuaian nilai aset di tahun ini disebabkan oleh perubahan mapping akun pada *update* aplikasi SAIBA 3.3, yaitu bahwa akun

penyesuaian nilai aset/persediaan di LPE dialokasikan ke dalam LO sebagai akun Beban dan Pendapatan Penyesuaian Persediaan.

*Koreksi Nilai
Persediaan*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode berjalan/sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp192.970.413.971,00 dan Rp31.214.401.398,00.

Koreksi Nilai Persediaan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 127
Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.03	Ditjen Kesmas	12.709.620,00	71.352.002,00
024.04	Ditjen Yankes	131.701.043.824,00	15.884.549.871,00
024.05	Ditjen PP dan PL	61.167.084.127,00	14.513.125.132,00
024.07	Ditjen Farmalkes	0,00	334.430.051,00
024.11	Badan Litbangkes	89.576.400,00	(140,00)
024.12	Badan PPSDM Kes	0,00	410.944.482,00
Jumlah		192.970.413.971,00	31.214.401.398,00

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per satker terdapat pada lampiran 12.

Penyebab Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 antara lain:

- Ditjen Yankes: Penginputan kembali saldo awal pada aplikasi persediaan (dari yang sebelumnya gelondongan menjadi rinci per item). Hal tersebut antara lain terjadi pada RSUP Sanglah, RSMH Palembang, RS Stroke Nasional Bukit Tinggi, RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang, dan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
- Ditjen PP dan PL: Terdapat persediaan dari pengadaan tahun 2015 yang baru diterima pada tahun 2016 dan terdapat kekeliruan input harga satuan pada Aplikasi Persediaan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp588.643.559.999,00 dan Rp389.343.679,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan yang dimiliki oleh Kantor Regional di Surabaya.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar (Rp102.297.773.787,00) dan Rp622.002.473.137,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 128
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31-Des-16	31-Des-15
024.01	Sekretariat Jenderal	(19.153.773.331,00)	(740.908.490,00)
024.02	Inspektorat Jenderal	(1.948.517.986,00)	0,00
024.03	Ditjen Kesmas	28.520.545.127,00	(5.830.425.883,00)
024.04	Ditjen Yankes	(115.641.199.829,00)	(276.069.432.933,00)
024.05	Ditjen PP	12.125.384.285,00	(162.269.250.646,00)
024.07	Ditjen Farmalkes	(8.117.418.429,00)	11.044.946.410,00
024.11	Badan Litbangkes	2.292.635.460,00	144.173.388,00
024.12	Badan PPSDM Kes.	(375.429.084,00)	1.055.723.371.291,00
Jumlah		(102.297.773.787,00)	622.002.473.137,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Koreksi Nilai Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.01	Sekretariat Jenderal	1.239.559.368,00	(740.908.490,00)
024.02	Inspektorat Jenderal	(71.627.557,00)	0,00
024.03	Ditjen Kesmas	28.670.694.877,00	(5.830.425.883,00)
024.04	Ditjen Yankes	(72.218.603.887,00)	(276.069.432.933,00)
024.05	Ditjen PP dan PL	17.853.210.569,00	(162.269.250.646,00)
024.07	Ditjen Farmalkes	1.162.773.110,00	11.044.946.410,00
024.11	Badan Litbangkes	4.510.395.465,00	144.173.388,00
024.12	Badan PPSDM Kes.	8.369.664.196,00	1.055.723.371.291,00
Jumlah		(10.483.933.859,00)	622.002.473.137,00

Rincian Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per satker terdapat pada lampiran 13.

Penyebab Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TA 2016 antara lain:

- 1) Akibat adanya reklasifikasi masuk dan keluar Aset Tetap;
- 2) Koreksi penyusutan Aset Tetap; dan
- 3) Normalisasi BMN atas Aset Tetap.

Tabel 130
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.01	Sekretariat Jenderal	(20.393.332.699,00)	-
024.02	Inspektorat Jenderal	(1.876.890.429,00)	-
024.03	Ditjen Kesmas	(150.149.750,00)	-
024.04	Ditjen Yankes	(43.422.595.942,00)	-
024.05	Ditjen PP dan PL	(5.727.826.284,00)	-
024.07	Ditjen Farmalkes	(9.280.191.539,00)	-
024.11	Badan Litbangkes	(2.217.760.005,00)	-
024.12	Badan PPSDM Kes.	(8.745.093.280,00)	-
Jumlah		(91.813.839.928,00)	-

Rincian Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per satker terdapat pada lampiran 14.

Penyebab Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi TA 2016 antara lain dikarenakan koreksi akibat amortisasi pertama kali atas Aset Tak Berwujud.

Koreksi Lain-lain

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp117.381.934.343,00 dan Rp392.520.811.692,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas kas, pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 131
Koreksi Lain-Lain TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.01	Sekretariat Jenderal	(59.931.259.638,00)	(15.554.831.015,00)
024.03	Ditjen Kesmas	(1.576.309.756,00)	(734.318.106,00)
024.04	Ditjen Yankes	201.388.177.568,00	434.657.077.789,00
024.05	Ditjen PP dan PL	(180.362.260,00)	(2.740.101.036,00)
024.07	Ditjen Farmalkes	3.713.658.636,00	202.264.781,00
024.11	Badan Litbangkes	581.996.704,00	(3.260.078.544,00)
024.12	Badan PPSDM Kes.	(26.613.966.911,00)	(20.049.202.177,00)
Jumlah		117.381.934.343,00	392.520.811.692,00

Rincian Koreksi Lain-Lain per satker terdapat pada lampiran 15.

Penyebab Koreksi Lain-Lain TA 2016 antara lain:

- 1) Setjen: Koreksi atas hibah jasa yang disahkan pada Tahun 2016 namun pelaksanaannya pada Tahun 2015.
- 2) Ditjen Kesmas: Koreksi atas adanya keterlambatan pengesahan hibah.
- 3) Ditjen Yankes: Koreksi akibat adanya penyesuaian pada akun-akun yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dilakukan koreksi pada tahun berjalan.
- 4) Ditjen PP dan PL: Koreksi atas saldo awal Hibah.
- 5) Ditjen Farmalkes: Koreksi akibat adanya pengembalian belanja yang berasal dari Hibah.
- 6) Badan Litbangkes: Koreksi atas adanya keterlambatan pengesahan hibah.
- 7) Badan PPSDM Kes: Koreksi atas hibah jasa yang disahkan pada Tahun 2016 namun pelaksanaannya pada Tahun 2015.

Transaksi Antar Entitas

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.749.268.505.270,00 dan Rp39.041.289.324.771,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN yang mencakup ditagihkan kepada dan

diterima dari entitas lain, transfer masuk dan keluar, serta pengesahan dan pengembalian hibah langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132
Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
Ditagihkan ke entitas lain	46.445.876.814.539,00	38.806.606.489.755,00	19,69
Diterima dari entitas lain	(887.498.790.803,00)	(681.128.923.078,00)	30,30
Sub Jumlah	45.558.378.023.736,00	38.125.477.566.677,00	19,50
Transfer Masuk	1.533.964.157.390,00	1.633.711.090.095,00	(6,11)
Transfer Keluar	(1.501.449.710.922,00)	(1.576.027.336.699,00)	(4,73)
Sub Jumlah	32.514.446.468,00	57.683.753.396,00	(43,63)
Pengesahan Hibah Langsung	1.174.421.108.253,00	881.401.732.949,00	33,24
Pengembalian Hibah Langsung	(16.045.073.187,00)	(23.273.728.251,00)	(31,06)
Sub Jumlah	1.158.376.035.066,00	858.128.004.698,00	34,99
Jumlah Transaksi Antar Entitas	46.749.268.505.270,00	39.041.289.324.771,00	19,74

Rincian Transaksi Antar Entitas menurut Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 133
Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31-Des-16	31-Des-15
024.01	Sekretariat Jenderal	28.550.853.943.934,00	22.906.172.603.769,00
024.02	Inspektorat Jenderal	95.543.511.804,00	82.744.745.388,00
024.03	Ditjen Kesmas	1.715.082.086.067,00	2.297.250.107.498,00
024.04	Ditjen Yankes	6.217.957.253.154,00	7.046.908.115.786,00
024.05	Ditjen PP dan PL	4.272.022.140.370,00	2.434.386.289.886,00
024.07	Ditjen Farmalkes	1.649.864.889.996,00	1.519.354.945.838,00
024.11	Badan Litbangkes	727.024.324.411,00	550.982.195.970,00
024.12	Badan PPSDM Kes.	3.520.920.355.534,00	2.203.490.320.636,00
Jumlah		46.749.268.505.270,00	39.041.289.324.771,00

Pada Sekretariat Jenderal jumlah terbesar transaksi antar entitas dipengaruhi oleh transaksi ditagihkan kepada entitas lain yaitu pada satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebesar Rp24.814.983.852.125,00 yang merupakan realisasi atas belanja sosial yang diklaim dan akan dibayarkan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di tahun 2016.

DDEL/DKEL

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp887.498.790.803,00 sedangkan DKEL sebesar Rp46.445.876.814.539,00.

Transfer Masuk/ Transfer Keluar

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.533.964.157.390,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.501.449.710.922,00.

Pengesahan dan Pengembalian Hibah Langsung

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.174.421.108.253,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp16.045.073.187,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TA 2016 per satker terdapat pada lampiran 16.

Ekuitas Akhir

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.710.647.659.719,00 dan Rp44.161.709.887.849,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp44.161.709.887.849 dan Rp42.295.954.922.184,00.

Surplus/Defisit

LO

E.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar (Rp44.997.028.867.926,00) dan (Rp38.293.098.053.316,00). Defisit LO merupakan penjumlahan dari Defisit Kegiatan Operasional dan Defisit Kegiatan Non Operasional.

Tabel 126
Surplus/Defisit TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
024.01	Setjen	(28.500.765.054.773)	(22.917.493.106.617)	24,36
024.02	Itjen	(95.476.481.374)	(80.973.554.032)	17,91
024.03	Ditjen Kesmas	(1.740.969.684.757)	(2.237.361.362.245)	(22,19)
024.04	Ditjen Yankes	(6.557.090.710.068)	(6.437.226.288.002)	1,86
024.05	Ditjen PP dan PL	(3.089.387.184.764)	(2.532.066.068.496)	22,01
024.07	Ditjen Farmalkes	(1.588.061.458.086)	(1.451.175.053.453)	9,43
024.11	Badan Litbangkes	(735.996.787.455)	(452.566.390.484)	62,63
024.12	Badan PPSDM Kes	(2.689.281.506.649)	(2.184.236.229.987)	23,12
Jumlah		(44.997.028.867.926)	(38.293.098.053.316)	17,51

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp796.698.134.526,00 dan Rp1.117.563.694.210,00. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Lain-Lain.

Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp71.436.664.304,00. Saldo Penyesuaian Nilai Aset tahun 2015 merupakan penyesuaian nilai persediaan disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan Harga Perolehan Terakhir. Selain itu juga merupakan pencatatan koreksi atas kesalahan persediaan yang terjadi dan diperbaiki pada tahun anggaran berjalan serta pembulatan akun-akun belum diregister.

Tidak ada penyesuaian nilai aset di tahun ini disebabkan oleh perubahan mapping akun pada *update* aplikasi SAIBA 3.3, yaitu bahwa akun

penyesuaian nilai aset/persediaan di LPE dialokasikan ke dalam LO sebagai akun Beban dan Pendapatan Penyesuaian Persediaan.

*Koreksi Nilai
Persediaan*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode berjalan/sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp192.970.413.971,00 dan Rp31.214.401.398,00.

Koreksi Nilai Persediaan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 127
Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.03	Ditjen Kesmas	12.709.620,00	71.352.002,00
024.04	Ditjen Yankes	131.701.043.824,00	15.884.549.871,00
024.05	Ditjen PP dan PL	61.167.084.127,00	14.513.125.132,00
024.07	Ditjen Farmalkes	0,00	334.430.051,00
024.11	Badan Litbangkes	89.576.400,00	(140,00)
024.12	Badan PPSDM Kes	0,00	410.944.482,00
Jumlah		192.970.413.971,00	31.214.401.398,00

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per satker terdapat pada lampiran 12.

Penyebab Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 antara lain:

- Ditjen Yankes: Penginputan kembali saldo awal pada aplikasi persediaan (dari yang sebelumnya gelondongan menjadi rinci per item). Hal tersebut antara lain terjadi pada RSUP Sanglah, RSMH Palembang, RS Stroke Nasional Bukit Tinggi, RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang, dan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
- Ditjen PP dan PL: Terdapat persediaan dari pengadaan tahun 2015 yang baru diterima pada tahun 2016 dan terdapat kekeliruan input harga satuan pada Aplikasi Persediaan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp588.643.559.999,00 dan Rp389.343.679,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan yang dimiliki oleh Kantor Regional di Surabaya.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar (Rp102.297.773.787,00) dan Rp622.002.473.137,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 128
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31-Des-16	31-Des-15
024.01	Sekretariat Jenderal	(19.153.773.331,00)	(740.908.490,00)
024.02	Inspektorat Jenderal	(1.948.517.986,00)	0,00
024.03	Ditjen Kesmas	28.520.545.127,00	(5.830.425.883,00)
024.04	Ditjen Yankes	(115.641.199.829,00)	(276.069.432.933,00)
024.05	Ditjen PP	12.125.384.285,00	(162.269.250.646,00)
024.07	Ditjen Farmalkes	(8.117.418.429,00)	11.044.946.410,00
024.11	Badan Litbangkes	2.292.635.460,00	144.173.388,00
024.12	Badan PPSDM Kes.	(375.429.084,00)	1.055.723.371.291,00
Jumlah		(102.297.773.787,00)	622.002.473.137,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Koreksi Nilai Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.01	Sekretariat Jenderal	1.239.559.368,00	(740.908.490,00)
024.02	Inspektorat Jenderal	(71.627.557,00)	0,00
024.03	Ditjen Kesmas	28.670.694.877,00	(5.830.425.883,00)
024.04	Ditjen Yankes	(72.218.603.887,00)	(276.069.432.933,00)
024.05	Ditjen PP dan PL	17.853.210.569,00	(162.269.250.646,00)
024.07	Ditjen Farmalkes	1.162.773.110,00	11.044.946.410,00
024.11	Badan Litbangkes	4.510.395.465,00	144.173.388,00
024.12	Badan PPSDM Kes.	8.369.664.196,00	1.055.723.371.291,00
Jumlah		(10.483.933.859,00)	622.002.473.137,00

Rincian Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per satker terdapat pada lampiran 13.

Penyebab Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi TA 2016 antara lain:

- 1) Akibat adanya reklasifikasi masuk dan keluar Aset Tetap;
- 2) Koreksi penyusutan Aset Tetap; dan
- 3) Normalisasi BMN atas Aset Tetap.

Tabel 130
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi TA 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.01	Sekretariat Jenderal	(20.393.332.699,00)	-
024.02	Inspektorat Jenderal	(1.876.890.429,00)	-
024.03	Ditjen Kesmas	(150.149.750,00)	-
024.04	Ditjen Yankes	(43.422.595.942,00)	-
024.05	Ditjen PP dan PL	(5.727.826.284,00)	-
024.07	Ditjen Farmalkes	(9.280.191.539,00)	-
024.11	Badan Litbangkes	(2.217.760.005,00)	-
024.12	Badan PPSDM Kes.	(8.745.093.280,00)	-
Jumlah		(91.813.839.928,00)	-

Rincian Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per satker terdapat pada lampiran 14.

Penyebab Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi TA 2016 antara lain dikarenakan koreksi akibat amortisasi pertama kali atas Aset Tak Berwujud.

Koreksi Lain-lain

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp117.381.934.343,00 dan Rp392.520.811.692,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas kas, pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 131
Koreksi Lain-Lain TA 2016 dan 2015 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31 Desember 2016	31 Desember 2015
024.01	Sekretariat Jenderal	(59.931.259.638,00)	(15.554.831.015,00)
024.03	Ditjen Kesmas	(1.576.309.756,00)	(734.318.106,00)
024.04	Ditjen Yankes	201.388.177.568,00	434.657.077.789,00
024.05	Ditjen PP dan PL	(180.362.260,00)	(2.740.101.036,00)
024.07	Ditjen Farmalkes	3.713.658.636,00	202.264.781,00
024.11	Badan Litbangkes	581.996.704,00	(3.260.078.544,00)
024.12	Badan PPSDM Kes.	(26.613.966.911,00)	(20.049.202.177,00)
Jumlah		117.381.934.343,00	392.520.811.692,00

Rincian Koreksi Lain-Lain per satker terdapat pada lampiran 15.

Penyebab Koreksi Lain-Lain TA 2016 antara lain:

- 1) Setjen: Koreksi atas hibah jasa yang disahkan pada Tahun 2016 namun pelaksanaannya pada Tahun 2015.
- 2) Ditjen Kesmas: Koreksi atas adanya keterlambatan pengesahan hibah.
- 3) Ditjen Yankes: Koreksi akibat adanya penyesuaian pada akun-akun yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dilakukan koreksi pada tahun berjalan.
- 4) Ditjen PP dan PL: Koreksi atas saldo awal Hibah.
- 5) Ditjen Farmalkes: Koreksi akibat adanya pengembalian belanja yang berasal dari Hibah.
- 6) Badan Litbangkes: Koreksi atas adanya keterlambatan pengesahan hibah.
- 7) Badan PPSDM Kes: Koreksi atas hibah jasa yang disahkan pada Tahun 2016 namun pelaksanaannya pada Tahun 2015.

Transaksi Antar Entitas

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.749.268.505.270,00 dan Rp39.041.289.324.771,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN yang mencakup ditagihkan kepada dan

diterima dari entitas lain, transfer masuk dan keluar, serta pengesahan dan pengembalian hibah langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132
Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015	%
Ditagihkan ke entitas lain	46.445.876.814.539,00	38.806.606.489.755,00	19,69
Diterima dari entitas lain	(887.498.790.803,00)	(681.128.923.078,00)	30,30
Sub Jumlah	45.558.378.023.736,00	38.125.477.566.677,00	19,50
Transfer Masuk	1.533.964.157.390,00	1.633.711.090.095,00	(6,11)
Transfer Keluar	(1.501.449.710.922,00)	(1.576.027.336.699,00)	(4,73)
Sub Jumlah	32.514.446.468,00	57.683.753.396,00	(43,63)
Pengesahan Hibah Langsung	1.174.421.108.253,00	881.401.732.949,00	33,24
Pengembalian Hibah Langsung	(16.045.073.187,00)	(23.273.728.251,00)	(31,06)
Sub Jumlah	1.158.376.035.066,00	858.128.004.698,00	34,99
Jumlah Transaksi Antar Entitas	46.749.268.505.270,00	39.041.289.324.771,00	19,74

Rincian Transaksi Antar Entitas menurut Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 133
Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2016 dan 2015
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Kode	Eselon	31-Des-16	31-Des-15
024.01	Sekretariat Jenderal	28.550.853.943.934,00	22.906.172.603.769,00
024.02	Inspektorat Jenderal	95.543.511.804,00	82.744.745.388,00
024.03	Ditjen Kesmas	1.715.082.086.067,00	2.297.250.107.498,00
024.04	Ditjen Yankes	6.217.957.253.154,00	7.046.908.115.786,00
024.05	Ditjen PP dan PL	4.272.022.140.370,00	2.434.386.289.886,00
024.07	Ditjen Farmalkes	1.649.864.889.996,00	1.519.354.945.838,00
024.11	Badan Litbangkes	727.024.324.411,00	550.982.195.970,00
024.12	Badan PPSDM Kes.	3.520.920.355.534,00	2.203.490.320.636,00
Jumlah		46.749.268.505.270,00	39.041.289.324.771,00

Pada Sekretariat Jenderal jumlah terbesar transaksi antar entitas dipengaruhi oleh transaksi ditagihkan kepada entitas lain yaitu pada satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebesar Rp24.814.983.852.125,00 yang merupakan realisasi atas belanja sosial yang diklaim dan akan dibayarkan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di tahun 2016.

DDEL/DKEL

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp887.498.790.803,00 sedangkan DKEL sebesar Rp46.445.876.814.539,00.

Transfer Masuk/ Transfer Keluar

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.533.964.157.390,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.501.449.710.922,00.

Pengesahan dan Pengembalian Hibah Langsung

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.174.421.108.253,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp16.045.073.187,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TA 2016 per satker terdapat pada lampiran 16.

Ekuitas Akhir

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.710.647.659.719,00 dan Rp44.161.709.887.849,00.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Ditjen P2P memiliki akun Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp17.567.278.660,00 dengan rincian sbb:
 - a. Direktorat P2PTVZ tahun 2015 mendapatkan hibah barang dari WHO kepada Subdit Filariasis dan Kecacangan berupa DEC (*Diethyl Carbamzine Citrate*) sebanyak 90.012 botol dengan nilai Rp17.467.278.660,00 sesuai dengan BAST Nomor 10/2015 tanggal 5 Agustus 2015. DEC pada tahun 2015 sudah didistribusikan seluruhnya ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Direktorat P2PMKJN tahun 2015 mendapat hibah jasa dari WHO sebesar Rp100.000.000,00 berupa aplikasi sehat jiwa berbasis *android*.

Hal tersebut di atas sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-10743/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2016.

2. Pada Neraca SAIBA dan SIMAK BMN Ditjen P2P tahun 2016 masih menyajikan persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda hasil pengadaan tahun 2016 sebesar Rp461.272.675.086,00.

Aset tersebut terdapat pada 3 kantor pusat yaitu:

- a. Direktorat P2PML sebesar Rp101.055.672.170,00;
- b. Direktorat P2PTVZ sebesar Rp21.287.700.904,00;
- c. Direktorat SKK sebesar Rp338.929.302.012,00.

Atas hal ini Ditjen P2P Mendorong agar satker diatas segera melengkapi Dokumen BAST dan mempercepat proses penghibahannya, sehingga apabila hibahnya sudah selesai atas barang-barang tersebut bisa dikeluarkan dari neraca Saiba dan Simak BMN.

3. Perubahan Nomenklatur dan Likuidasi Satker Kantor Pusat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sejak 1 Januari 2016 terdapat perubahan nama pada 4 (empat) Unit Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel 134
Restrukturisasi Unit Eselon 1

No.	Nama Lama Unit Eselon 1	Nama Baru Unit Eselon 1
1	Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Ditjen Kesehatan Masyarakat
2	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	Ditjen Pelayanan Kesehatan
3	Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Selain itu dilakukan likuidasi 9 (sembilan) satuan kerja Kementerian Kesehatan yaitu:

Tabel 135
Satuan Kerja yang di Likuidasi TA 2016

No	Unit Eselon I	Satker Likuidasi
1	Sekretariat Jenderal	1 Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan 2 Pusat Promosi Kesehatan

No	Unit Eselon I	Satker Likuidasi
2	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1 Direktorat Bina Kesehatan Ibu 2 Direktorat Bina Kesehatan Anak 3 Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
3	Ditjen Pelayanan Kesehatan	1 Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik 2 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
4	Ditjen PP dan PL	1 Direktorat Penyehatan Lingkungan
5	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Adapun beberapa Satuan Kerja yang telah melakukan *transfer out* atas likuidasi tersebut diantaranya:

- a. Seluruh Barang Milik Negara Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik telah di *transfer out* ke Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan pada pelaporan LBMN Semester II Tahun 2016;
 - b. Seluruh aset dan kewajiban dari Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan seluruhnya dialihkan ke Direktorat Penilaian Alat Kesehatan sesuai dengan SK Direktur Jenderal Kefarmasian tentang Penetapan Penanggung Jawab Likuidasi Satker;
 - c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik dilikuidasi dan aset dialihkan kepada Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dilikuidasi dan aset dialihkan kepada Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan.
4. Penambahan Satker baru dan perubahan nama Satuan Kerja

Pada TA 2016 Terdapat beberapa penambahan Satker baru dan perubahan beberapa nama Satker pada Unit Eselon 1 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 136
Penambahan Satuan Kerja Baru TA 2016

No	Unit Eselon I	Satker Baru
1	Sekretariat Jenderal	1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan
2	Ditjen PP dan PL;	1 Direktorat Pencegahan Penyakit Masalah Kejiwaan dan NAPZA
3	Ditjen Kesmas	1 Direktorat Promosi Kesehatan 2 Direktorat Penyehatan Lingkungan
4	Ditjen Yankes	1 Direktorat Kesehatan Tradisional 2 Direktorat Akreditasi dan Mutu
5	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.	1 Direktorat Penilaian Alat Kesehatan Dan PKRT 2 Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Dan PKRT

Perubahan nama 3 (tiga) Satuan Kerja pada Unit Eselon 1 Setjen yaitu :

Tabel 137
Perubahan Nama Satuan Kerja TA 2016

No	Nama Satker Lama	Nama Satker Baru
1	Pusat Kerjasama Luar Negeri	Biro Kerjasama Luar Negeri
2	Pusat Komunikasi Publik	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
3	Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan	Pusat Krisis Kesehatan

5. Pengelolaan Aset Flu Burung yang masih dalam proses hukum

Terkait dengan perkembangan KDP Flu Burung sudah ditindaklanjuti sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor HK.06.02/2/785/2017 tanggal 24 Februari 2017. Hasil kesimpulan pada rapat tersebut adalah:

- a. Berdasarkan amar putusan pengadilan, barang sitaan dititipkan kepada PT Biofarma (dokumen akan dilihat kembali) sehingga PT Biofarma akan segera mendapatkan surat pendelegasian penitipan dari Kejaksaan Negeri untuk memelihara barang tersebut;
 - b. Kejaksaan Agung akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri terkait surat pendelegasian penitipan barang sitaan pabrik vaksin flu burung;
 - c. Pembukaan garis polisi (police line) bukan lagi kewenangan dari Bareskrim Mabes Polri, tetapi sudah diserahkan dari Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, maka menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung;
 - d. Ditjen P2P tidak mempunyai kewenangan terhadap usulan perizinan dari PT Biofarma untuk pemindahan barang sitaan pabrik vaksin flu burung.
6. Terdapat alat kesehatan berupa *Linac* 2100C/1394 yang merupakan Aset milik RSCM berada di Batan Yogyakarta dalam rangka penelitian dan pengembangan nuklir.
7. Sesuai Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.04.02/3/1533/2017 tanggal 21 Maret 2017, Kepada Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, perihal Data Tuntutan Hukum kepada Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa Kementerian Kesehatan menghadapi Tuntutan Hukum sebanyak 26 buah kasus (rincian pada lampiran 17). Adapun posisi tuntutan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Masih proses Pengadilan Negeri = 7
 - b. Menunggu Putusan Banding = 5
 - c. Menunggu Putusan Kasasi = 6
 - d. Menunggu proses pengajuan PK = 1
 - e. Menunggu putusan PK = 3
 - f. Lain-lain = 4
8. Terdapat beberapa Satker Kementerian Kesehatan yang status tanahnya sudah tercatat sebagai aset Kementerian Kesehatan, namun belum bersertifikat. Saat ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan identifikasi/pemetaan tanah tersebut sehingga di tahun 2017 sudah ada progres pensertifikatan tanah. Terkait dengan proses pensertifikatan tanah sudah dianggarkan di Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.